

SKRIPSI

KONFEDERALISME DEMOKRASI SEBAGAI DEMOKRASI TANPA NEGARA DI WILAYAH OTONOM ROJAVA



FADLI DZIL IKRAM

1710521028

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2022

SKRIPSI
KONFEDERALISME DEMOKRASI SEBAGAI DEMOKRASI
TANPA NEGARA DI WILAYAH OTONOM ROJAVA



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

FADLI DZIL IKRAM

1710521028

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022

SKRIPSI

KONFEDERALISME DEMOKRASI SEBAGAI DEMOKRASI TANPA NEGARA DI WILAYAH OTONOM ROJAVA

disusun dan diajukan oleh

FADLI DZIL IKRAM

1710521028

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **6 Maret 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,
TIM PENGUJI**

No	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Ketua	1. 
2.	Kardina, S.IP., M.A. NIDN: 0922068103	Sekretaris	2. 
3.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Anggota	3. 
4.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Anggota	4. 

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar**


Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Fadli Dzil Ikram
NIM : 1710521028
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Konfederalisme Demokrasi Sebagai Demokrasi Tanpa Negara**" adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 18 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Fadli Dzil Ikram

PRAKATA

Pertama-tama segala puji dan syukur saya utarakan untuk Tuhan segala semesta dan se-isinya, yang tidak henti-hentinya memberikan keindahan dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “Analsisi Konfederalsime Demokrasi sebagai Demokrasi Tanpa Negara”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Strata 1 (S-1) pada program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar Makassar.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Aku dan seluruh pihak yang telah membantu selama proses pengerjaan Skripsi berlangsung sampai dengan selesainya laporan ini dibuat. Dengan segala ketenangan jiwa, penulis ingin menyampaikan banyak maaf, cinta, rindu dan terima kasih

Kepada:

1. Tuhan segala semesta dan se-isinya yang telah memberikan banyak energi cinta untuk menyelesaikan seluruh proses penelitian hingga akhir dengan baik.
2. Orang tua penulis, Teruntuk alm H Mursalin Usman Bapak ku, terima kasih atas segala rasa, terima kasih atas segala bimbingan, terima kasih atas segala yang diperjuangkan. Tak cukup maaf dan terima kasih aku berikan dan ucapkan untuk menebus kerinduan yang tiada henti ini. Satu hal yang ingin saya bisakkan pada beliau “pak selesaima, selaimi anakta” . Maaf dan Terima kasih BAPAK.
3. Orang tua penulis, Teruntuk Salwatiah Nuhung mama ku, cinta pertama ku, bidadari ku, surga ku, terima kasih atas segala rasa dan kasih mu, terima kasih atas segala keindahan yang selalu dipancarkan olehmu, maaf dan terima kasih MAMA.
4. Dosen penanggung jawab serta pembimbing dan juga Penasehat Akademik. Terimakasih atas segala waktu yang diluangkan selama penulis melakukan penyusunan skripsi
5. Bapak dan Ibu prodi ilmu hubungan internasional yang telah megajar saya dari awal masuk saya dikampus sampai dengan saya selesai. Makasih atas ilmu dan motivasinya selama proses belajar.
6. Terimakasih kepada kawan-kawan Amerta (kopang, feby, tyas, dan piter) terimakasih telah memberikan pelukan hangat..
7. Terimakasih Juga kepada Seluruh kerabat dan saudara yang tak sempat kuucapkan terima kasih.

ABSTRAK

KONFEDERALISME DEMOKRASI SEBAGAI DEMOKRASI TANPA NEGARA DI WILAYAH OTONOM ROJAVA

FADLI DZIL IKRAM

Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil. I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Kurdi-Rojava dalam mempertahankan Gerakan kolektif masyarakat tanpa negara dan dimensi-dimensi *ideas* Konfederalisme. Penelitian ini sendiri menggunakan konsep Konfederalisme Demokrasi dan Post Anarkisme dengan menerapkan metode analisis deskriptif. Konfederalisme demokrasi sendiri merupakan bentuk paradigma sosial non-negara, atau demokrasi langsung tanpa negara dan melibatkan proses pengambilan keputusan demokratis berdasarkan konsensus kolektif yang bertumpu pada partisipasi sukarela. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam konteks globalisasi dan hegemoni kapitalisme global, Post-Anarkisme dan Konfederalisme Demokrasi menawarkan alternatif yang lebih konkret dan pragmatis untuk melawan sistem yang menindas dan menghisap sumber daya alam dan manusia. Mereka menekankan pada pentingnya membangun solidaritas global antara gerakan sosial dan politik yang bertujuan menggulingkan hegemoni negara dan kapitalisme global. Dalam hal ini, Post-Anarkisme dan Konfederalisme Demokrasi menawarkan sebuah wawasan baru tentang bagaimana hubungan internasional dapat dikelola secara lebih demokratis dan adil, dengan menekankan pada partisipasi langsung dari masyarakat dalam pengambilan keputusan serta membangun solidaritas global antara gerakan sosial dan politik.

Kata Kunci : Konfederalisme Demokrasi, Rojava, Post-Anarkisme, Revolusi Rojava, Demokrasi tanpa Negara

ABSTRACT

DEMOCRATIC CONFEDERALISM AS A STATELESS DEMOCRACY IN THE ROJAVA AUTONOMOUS REGION

FADLI DZIL IKRAM

Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil. I.

This study aims to determine the attempts of Rojava Kurds to defend the collective movements of the community as a stateless democracy and the dimensional ideas of democratic confederalism. This research uses democratic confederalism concept by descriptive analysis method. Democratic confederalism itself is a stateless social paradigm, or direct democracy without the concept of state and includes the process of democratic decision making based on collective consensus by voluntary participation. The results of this study indicate that under the context of globalization and hegemony global capitalism, Post-Anarchism and Confederalism Democracy proposed the more concrete and pragmatist alternative to against system that repress natural and human resources. They emphasize the importance to develop global solidarity amongst social and political movement to overthrow the hegemony of the state and the global capitalism. In this case, Post-Anarchism and Democracy confederalism proposed new insight about how International Relation could be managed in a fairer and more democratic way by emphasizing direct participation from the society to establish the global participation amongst social and political movement.

Key Word : *Democratic Confederalism, Rojava Revolution, Post-Anarchism, Stateless Democracy*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Konsep dan Teori.....	11
2.1.1 Konsep Konfederalisme Demokrasi	11
2.1.2 Teori Post-Anarkisme.....	14
BAB III	21
METODE PENELITIAN	21
3.1 Rancangan Penelitian.....	21
3.2 Kehadiran Peneliti.....	21
3.3 Lokasi Penelitian.....	21
3.4 Sumber Data.....	22
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.6 Analisis Data.....	22

3.7	Pengecekan Validitas Data.....	23
3.8	Tahap-Tahap Penelitian.....	23
BAB IV.....		25
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		25
4.1	Sejarah dan Perkembangan Kurdi Rojava.....	25
4.2	Konfederalisme Demokrasi Sebagai Instrumen.....	32
4.2.1	Konfederalisme Demokrasi Versus Negara-Bangsa	35
4.2.2	Dari Bookchin Ke Ocalan : Munisipalisme Libertarian Dan Konfederalisme Demokrasi	40
4.3	Post-Anarkisme Sebagai Suatu Orientasi Politik.....	51
4.4	Upaya Kurdi-Rojava Dalam Mempertahankan Gerakan Kolektif Masyarakat Tanpa Negara	60
4.5	Dimensi <i>Ideas</i> Konfederalisme Demokrasi Sebagai Metodologi Tandingan Dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer.....	63
BAB V.....		73
PENUTUP.....		73
5.1	Kesimpulan	73
5.2	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....		76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kawasan Timur Tengah belakangan ini menjadi perhatian global karena banyak isu-isu yang menarik, salah satunya yaitu politik Arab Spring. Peristiwa ini merupakan gelombang protes pro-demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2010 dan 2011 yang menolak adanya rezim otoriter dikawasan tersebut. Peristiwa ini dimulai dari protes Tunisia dan Mesir yang mendorong upaya-upaya serupa di negara arab lainnya ¹. Dan salah satu Negara yang terkena dampak dari Arab Spring adalah Suriah, mereka mengalami proses revolusi dalam periode waktu yang cukup lama dibandingkan Negara lainnya. Hal ini sendiri disebabkan banyak pihak seperti negara-negara dan kelompok-kelompok terorganisir yang terlibat. Hal ini terus berlanjut dan menjadi sebuah katalisator perang sipil di Suriah pada tahun 2011.²

Pada tahun 2011,³ sebagai awal mula aksi protes terjadi terhadap rezim otoriter Presiden Bashar al-Assad dan tindakan brutal dari pemerintah saat itu menjadi sebuah katalisator dari perang saudara di Suriah. Selama perang dan konflik di Suriah berlangsung, Suriah kemudian terpecah menjadi daerah-daerah yang dikendalikan oleh baik dari pemerintahan Bashar al-Assad, kelompok-kelompok oposisi yang berbeda terutama *Free Syrian Army* (FSA) atau para Jihadis di Suriah. Selama perang saudara berlangsung dengan berbagai kekacauannya.

¹ 'Arab Spring | History, Revolution, Causes, Effects, & Facts | Britannica' <<https://www.britannica.com/event/Arab-Spring>> [accessed 4 January 2023].

² Dakheelallah Alharbi, Zarina Othman, and Sity Daud, 'The Arab Spring and Syria Security', *Global Journal of Political Science and Administration*, 7.5 (2019), 43–49.

³ Ibid, Hal. 43

Kemudian pada 18 Juli 2012 tepatnya pada malam hari,⁴ Kurdi Suriah bersenjata menguasai beberapa titik menuju keluar dari kota Kobane, Suriah Utara.⁵ Pasukan Kurdi menolak permintaan *Free Syrian Army* (FSA) dan mengatakan bahwa Kurdi dapat mengendalikan wilayah mereka sendiri. Kata Hussein Kochar, seorang pejabat PYD pada waktu itu, war sipil di kota itu mengepung dan merebut semua lembaga negara di kota itu. Akhirnya, kerumunan orang berkumpul di depan pangkalan militer Tentara Arab Suriah (SAA) kota itu. Delegasi populer untuk Angkatan bersenjata menuntut agar mereka menyerahkan senjata mereka tetapi menjamin jalan yang aman, dihadapkan dengan situasi tanpa harapan, para prajurit pun setuju.⁶

Beberapa tentara kemudian kembali ke keluarga mereka di seluruh negeri, sementara kelompok lain tetap tinggal untuk mencegah kota jatuh ke tangan *Free Syrian Army* (FSA). Dan mereka semua telah menjadi saksi lahirnya Revolusi Rojava, yang dimana kaum revolusioner Kurdi merebut kembali bagian utara Suriah, yang dikenal sebagai Rojava, yang berarti “Barat” dalam Bahasa Kurdi dan mengacu pada bagian barat Kurdistan, kemudian dari kota Kobane pemberontak kemudian menyebar ke seluruh kota-kota mayoritas Kurdi lainnya di seluruh Suriah Utara dalam hitungan hari. Satu hari setelah beberapa institusi pemerintahan Bashar al-Assad dan *Syrian Arab Army* (SAA) dipaksa keluar dari Kobane, rakyat juga mengambil kendali atas lembaga-lembaga

⁴ Ibid, Hal. 44

⁵ ‘The Rojava Revolution – A Decade On (Part I) – Rojava Information Center’ <https://rojavainformationcenter.com/2022/07/10-years-of-the-rojava-revolution-much-achieved-still-much-to-come/#footnote_23_12522> [accessed 9 October 2022].

⁶ ‘More Kurdish Cities Liberated As Syrian Army Withdraws from Area’ <<https://www.gulanmedia.com/en/story/109886/1621544504-2094-more-kurdish-cities-liberated-as-syrian-army-withdraws-from-area.>> [accessed 9 October 2022].

pemerintah di Afrin dan Amude, serta di Derik dan seluruh wilayah Jazeera.⁷

Pada 21 Juli 2012 *Syrian Arab Army* (SAA) dan lembaga pemerintahan lainnya kemudian menarik diri dari daerah-daerah tersebut dan menyerahkan mayoritas Suriah Utara kepada *Democratic Union Party* (PYD) sebuah partai Kurdi-Suriah, PYD yang memiliki kedekatan dan membangun afiliasi dengan *Kurdistan Workers Party* (PKK) sebuah partai atau organisasi politik militant Kurdi dan gerakan gerilya bersenjata, yang secara historis beroperasi di seluruh Kurdistan, terutama berbasis di daerah pegunungan mayoritas Kurdi di Turki Tenggara dan Irak Utara. Kemudian membentuk milisinya yaitu *People's Protection Units* (YPG) dan *Women's Protection Units* (YPJ).⁸

YPG dan YPJ dikenal dengan keberhasilan perlawanannya yang massif melawan kebrutalan dan kekerasan negara islam. Revolusi Rojava kemudian dikenal secara luas dengan berbagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh tentara swadaya masyarakatnya yang berhasil dalam membebaskan tanah yang berada di bawah kendali Negara Islam, kemudian mengamankan hak-hak dan perlindungan agama dan etnis di wilayah tersebut.

Serangkaian keterlibatan kritis dengan praktik revolusioner yang sedang berlangsung dari proyek non-statis dan non-kapitalis, konfederasi demokratis di wilayah yang dikendalikan oleh Administrasi Otonomi Suriah Utara dan Timur (AANES), atau lebih dikenal sebagai Rojava. Apa yang disebut Revolusi Rojava menyusuk narasi distopia tentang dunia dan

⁷ Dakheelallah Alharbi, Othman, and Sity Daud.

⁸ 'Syrian Kurdish Militia Takes Over Oil Fields - Al-Monitor: Independent, Trusted Coverage of the Middle East' <<https://www.al-monitor.com/originals/2013/03/power-vacuum-oil-fields-syria-kurdish-militia-pyd.html>> [accessed 9 October 2022].

Timur Tengah, perjuangan model konfederalisme demokrasi ini digambarkan tokoh revolusioner Kurdi yaitu Abdullah Ocalan sebagai bentuk demokrasi tanpa Negara, sebuah cita-cita yang didasarkan pada pemerintahan sendiri lokal, kesetaraan gender, ekonomi komunal, sekularisme dan keragaman budaya dan agama.

Maka dari itu revolusi Rojava bukan hanya perjuangan militer tapi juga merupakan perjuangan budaya dan perjuangan mengubah mentalitas seperti yang dikatakan oleh Amina Osse, Wakil Ketua Komite Urusan Luar Negeri kanton Cizire di Rojava Dengan perubahan mentalitas ini, *“mengacu pada kebangkitan ideologis Rojava melalui praktik demokrasi tanpa negara. Dan model lama negara-bangsa, tidak mampu mewakili keragaman masyarakat, karena sifatnya yang terpusat dan homogen. Negara-bangsa lebih lanjut beroperasi sebagai kendaraan untuk modal global, hak istimewa, dan hubungan patriarki, dan bertentangan dengan cita-cita masyarakat ekologis yang berkelanjutan. Dalam hal itu, Negara Islam ultrafundamentalis dan hiperpatriarki, yang muncul dari sejarah politik imperialis yang kejam di kawasan itu, sangat kontras dengan cita-cita Rojava tentang demokrasi non-negara, yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan keragaman budaya”*.⁹

Konfederalisme demokrasi memungkinkan menjadi suatu alternatif dari masalah historis dan sosial yang semakin dalam oleh modernitas kapitalis. Dalam hal ini, ia meramalkan rekonstruksi paradigmatik dari setiap bidang kehidupan masyarakat. Unit fundamentalnya dari

⁹ Brian McKenna, 'New Worlds', *Infosecurity Today*, 1.4 (2004), 1 <[https://doi.org/10.1016/S1742-6847\(04\)00073-4](https://doi.org/10.1016/S1742-6847(04)00073-4)>.

reorganisasi kehidupan masyarakat adalah bangsa yang demokratis.¹⁰ Konfederalisme demokrasi dapat menjadi gambaran atau alternative baru dalam studi hubungan internasional dan realitas global, seperti yang kita ketahui bahwa realitas global dan konsep Negara modern dewasa ini sangat terpengaruh oleh konsep kedaulatan westphalia, mengingat bahwa perjanjian westphalia adalah kesepakatan damai untuk mengakhiri perang dan konflik saat itu kemudian menjadi cikal bakal lahirnya konsep Negara-bangsa. Dengan munculnya negara-bangsa sebagai aktor yang dominan dalam setiap perilaku politik hubungan internasional maka konsepsi tatanan sistem negara ini merupakan pola kehidupan internasional dewasa ini.

Namun sebagaimana Negara telah lazim dan akrab dalam kehidupan modern, juga menjadi wahana kekuasaan bagi segelintir kelas maupun elit yang tersentralisasi. Bahkan ketika kalangan realis, liberal hingga konservatif sama-sama menyambut kekuasaan yang begitu nyata dalam suatu Negara kemudian merasionalisasi Negara sebagai yang diperlukan menjaga tatanan sosial yang teratur dikarenakan sifat manusia. Lalu sebagian dari mereka yang mengagungkan Negara dan menganggap Negara sebagai suatu berkah dan pendorong majunya suatu peradaban jelas-jelas cacat.¹¹

Melihat secara epistemologis teori-teori dalam studi hubungan internasional, seperti realisme hingga neorealisme yang beranggapan dan sangat percaya terhadap sentralitas Negara dalam struktur politik internasional, mereka percaya bahwa negara memiliki otoritas tertinggi

¹⁰ 'The Main Principles of Democratic Confederalism – ADM' <<https://democraticmodernity.com/the-main-principles-of-democratic-confederalism/>> [accessed 10 October 2022].

¹¹ Nicholas J. Kiersey and Doug Stokes, *Michel Foucault Dan Hubungan Internasional*, 2014, I.

dan bahwa tidak ada negara yang boleh mewariskan otoritas ini kepada entitas asing mana pun. Memandang negara sebagai aktor yang rasional dan otonom. Kaum realis memperluas otonomi negara untuk tidak hanya memasukkan otonomi dari organisasi internasional tetapi juga otonomi yang cukup dari masyarakat nasional mereka untuk mengakui dan mengejar kepentingan negara secara keseluruhan.¹² Sikap koheren domestik ini memungkinkan mereka untuk melakukan kontrol atas berbagai organisasi, etnis, dan agama dalam suatu negara untuk mengarahkan dan mengendalikan tindakannya melalui penerapan strategi pembuat keputusan nasional. Hal ini menghadirkan potensi dilema dan konflik domestik, Seperti negara-negara di Timur Tengah, di mana kekacauan domestik dan kompleksitas budaya secara signifikan mengubah perilaku negara.

Beda halnya pada Teori liberalisme dan neoliberalisme, Kaum liberal yang secara epistemologis berangkat dari kebebasan hak setiap individu, dan menghadirkan konsepsi demokrasi kapital yang dimana melihat pasar sebagai tempat di mana orang memiliki hak individu tetapi bukan kolektif,¹³ selama kapitalisme bebas dari batasan demokrasi liberalisme dan neoliberalisme berada dalam pijakan yang sangat berbahaya bagi kelas sosial tertentu dalam negara-negara dunia ketiga termasuk di kawasan timur tengah. Dimana pemodal dan elit tertentu menggunakan kekuatan yang diberikan oleh akumulasi kekayaan mereka untuk mempengaruhi kehidupan politik internasional, mengatur ulang kebijakan untuk melindungi dan memperluas kekayaan mereka.

¹² Walter Carlsnaes, Thomas Risse, and Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, 2013, I.

¹³ Scott Burchill and Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, 2015, v.

Dengan hal itu konflik global yang terjadi akibat dari beberapa Negara di seluruh dunia begitu jelas menanggapi kegagalan teori-teori yang eksis dalam studi hubungan internasional. Seperti yang terjadi kepada etnis kurdi di turki, yang dimana Turki secara historis memiliki asimilasi budaya paksa yang luas dan berkelanjutan, penindasan politik, dan pembatasan umum pada semua minoritas non-Turki, termasuk melarang berbicara bahasa Kurdi (sepenuhnya hingga tahun 1990-an). Itulah yang menjadi cikal bakal terbentuknya PKK dan terlibat dalam pemberontakan selama beberapa dekade melawan negara Turki, sehingga membuat Ocalan sebagai tokoh revolusioner kurdi ingin membentuk otonomi kurdi di turki kemudian bergeser dan membangun afiliasi dengan PYD di Suriah dengan konsep dan formasi politik yang berbeda yaitu konfederalisme demokrasi.¹⁴

Namun juga rezim negara-bangsa di Timur Tengah yang katanya terpengaruh terhadap terbentuknya panji-panji sekularisme, tetapi kenyataannya tidak ada satupun yang benar-benar sekuler. Di bawah panji sekularisme, masyarakat Timur Tengah menjadi sasaran penindasan dan ketidakadilan. Hal ini kemudian yang memicu berbagai konflik identitas terhadap kelompok tertentu di Timur tengah, inilah yang menjadi alasan lain penolakan Ocalan terhadap nasionalisme di timur tengah statis dan advokasi demokrasi langsung, desentralisasi politik, kesetaraan gender, dan ekonomi ekologi komunal menimbulkan tantangan yang sama sekali baru terhadap sifat tatanan politik regional, politik internasional, kontestasi geopolitik dan menawarkan kemungkinan jalan keluar dari krisis modernitas kapitalis saat ini.

¹⁴ Yasin Sunca, 'The Revolution in Rojava and the International', *Envisioning the World: Mapping and Making the Global*, July 2012, 2021, 105–23 <<https://doi.org/10.14361/9783839455296-009>>.

Pemerintahan sendiri demokratis, Rojava didirikan berdasarkan Piagam Sosial, juga disebut sebagai Kontrak Sosial. Itu secara kolektif ditulis oleh semua orang yang mendiami wilayah Kurdi, Arab, Asyur, Kasdim, Aram, Turkmenistan, Armenia, dan Chechen.¹⁵ Di dalamnya terkandung pilar-pilar model konfederalisme demokratis, model politik sekuler yang menjamin kesetaraan gender, menjunjung tinggi prinsip prinsip komunalis sosial, praktik kolektivis artinya kekuasaan terpusat direduksi seminimal mungkin. Adapula tiga kanton Rojava Afrin, Cizire dan Kobani kemudian berafiliasi, tetapi mereka mengatur urusan mereka secara mandiri¹⁶. Salah satu prinsipnya adalah bahwa setiap daerah akan memahami realitasnya dengan sebaik-baiknya.

Revolusi Rojava juga memiliki dasar ideologis yang kuat dan itu dibangun atas dasar-dasar konfederalisme demokrasi, kemandirian, pemerintahan sendiri, otonomi, dan kemerdekaan sejati tidak melalui suatu Negara. Menempatkan dimensi inti revolusi Rojava dalam pengaturan geopolitik spesifiknya, yang secara kritis merefleksikan signifikansi politik dunianya. Dengan demikian, kontribusi saat ini menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang pembentukan, evolusi, dan kontradiksi AANES atau Rojava, kemudian tantangan yang dihadapinya dan apa arti perkembangan konfederalisme demokrasi di revolusi Rojava bagi dunia dalam krisis.

¹⁵ 'Explainer: The Syrian Democratic Council – A Proposal for a Democratic Syria – Rojava Information Center' <<https://rojavainformationcenter.com/2020/06/explainer-the-syrian-democratic-council-a-proposal-for-a-democratic-syria/>> [accessed 9 October 2022].

¹⁶ 'The Battle for Raqqa and the Challenges after Liberation – Combating Terrorism Center at West Point' <<https://ctc.westpoint.edu/the-battle-for-raqqa-and-the-challenges-after-liberation/>> [accessed 9 October 2022].

Namun, timbul kemudian berbagai pertanyaan terhadap gerakan yang lahir dari revolusi Rojava dan melakukan kolonisasi baru bagi para nasionalis arab di timur tengah.

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini yaitu untuk membahas bagaimana dimensi Ideas Konfederalisme Demokrasi sebagai metodologi tandingan dalam studi Hubungan Internasional.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana upaya Kurdi-Rojava dalam mempertahankan gerakan kolektif masyarakat tanpa Negara?
2. Bagaimana dimensi *Ideas* Konfederalisme Demokrasi sebagai metodologi tandingan dalam studi Hubungan Internasional kontemporer ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui upaya masyarakat di wilayah otonom Rojava dalam mempertahankan gerakan kolektifnya melalui dimensi ide (*ideas*) dan pengaruh perkembangan demokrasi Kurdi-Rojava.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberi referensi tambahan bagi disiplin Ilmu Hubungan Internasional khususnya dalam bidang

kajian Konfederalisme demokrasi sebagai bentuk demokrasi tanpa Negara

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara Praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi terkait revolusi Rojava yang membentuk tatanan politik secara mandiri yaitu konfederalisme demokrasi, serta menjadi bahan kajian bagi para akademisi studi hubungan internasional. Dan juga diharapkan menjadi masukan bagi segala pihak dimasa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Konsep dan Teori

Tinjauan konsep dan teori digunakan oleh penulis untuk menjawab fenomena yang ada dengan berbagai macam teori dan konsep yang digunakan, diharapkan dapat menggambarkan topik yang diangkat.

2.1.1 Konsep Konfederalisme Demokrasi

Konfederalisme demokrasi ialah bentuk paradigma sosial non-negara, atau demokrasi langsung tanpa negara dan melibatkan proses pengambilan keputusan demokratis berdasarkan konsensus kolektif yang bertumpu pada partisipasi sukarela.

Konfederalisme demokrasi adalah formasi politik di mana masyarakat mengatur dirinya sendiri dan di mana semua kelompok masyarakat dan identitas budaya dapat mengekspresikan diri dalam pertemuan lokal, konvensi umum dan dewan.¹⁷ Yang penting adalah kemampuan untuk mengambil keputusan melalui dewan dan diskusi. ini didasarkan pada partisipasi akar rumput. Proses pengambilan keputusannya terletak pada masyarakat, tingkat yang lebih tinggi hanya melayani koordinasi dan implementasi kehendak masyarakat yang mengirim delegasi mereka ke majelis umum. Setiap komunitas, etnis, budaya, komunitas agama, gerakan intelektual, unit ekonomi dan yang lainnya dapat secara mandiri mengkonfigurasi dan mengekspresikan diri sebagai unit politik.

Konfederalisme demokrasi sebagaimana yang dikatakan Ocalan ialah ekspresi etis, politik, dan administratif masyarakat sebagai struktur historis dan sosiologis yang dimana identitas, faksi, dan kelompok yang

¹⁷ Abdullah Ocallan, *Revolusi Perempuan Kehidupan Membebaskan*, 2022.

berbeda hidup berdampingan dalam harmoni dialektis.¹⁸ Dengan ini kita tidak mengacu pada struktur konfederasi klasik yang terdiri dari negara-negara, tetapi kesatuan konfederasi dari struktur masyarakat. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah bahwa yang satu bergantung pada negara dan yang lainnya pada masyarakat.

Ketika kita mendekati subjek ini dari perspektif sejarah, kita dapat melihat bahwa modernitas kapitalis berbasis negara dan modernitas demokratis berbasis masyarakat terkunci dalam konflik abadi. Sementara modernitas kapitalis mendasarkan dirinya pada keuntungan maksimum, industrialisme dan negara-bangsa, modernitas demokratis mendasarkan dirinya pada masyarakat demokratis, konfederasi demokratis dan eko-industri.

Sebelumnya beberapa pemikir anarkisme seperti Bakunin, Proudhon telah menjelaskan dan menggambarkan formasi politik konfederasi. Namun pemikir yang paling dekat dari gagasan konfederalisme demokrasi ialah Murray Bookchin, Bookchin salah satu pemikir anarkisme yang kemudian mengubah orientasi politiknya menjadi munisipal libertarianisme.

Dalam esainya "The Meaning of Confederalism," Bookchin menempatkan konfederasi sebagai bagian penting dari politik komunal, politik yang merangkul pengorganisasian di tingkat kota sebagai bagian dari kerangka ekologi sosial. Dia mendefinisikan konfederasi sebagai jaringan dewan administrasi yang anggota atau delegasinya dipilih dari majelis demokratis tatap muka yang populer, di berbagai desa, kota, dan bahkan lingkungan kota-kota besar. Para anggota dewan konfederasi ini secara ketat diberi mandat, dapat dipanggil kembali, dan bertanggung

¹⁸ 'The Main Principles of Democratic Confederalism – ADM'.

jawab kepada majelis-majelis yang memilih mereka untuk tujuan mengoordinasikan dan mengelola kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh majelis itu sendiri.¹⁹

Beroperasi atas dasar penarikan kembali, mandat imperatif, akuntabilitas, pengawasan konstan oleh konstituensi dan otonomi lokal, struktur konfederasi menawarkan cara untuk mengatur majelis demokratis langsung dalam skala besar. Peningkatan majelis-majelis ini melalui konfederasi diperlukan untuk menciptakan kekuatan yang mampu menantang, dan akhirnya menggantikan negara. Dari inilah konsep Konfederalisme demokrasi di Rojava yang digagaskan oleh Ocalan berangkat dan terpengaruh terhadap konsep munisipal libertarianisme Boockhin.²⁰

Penulis juga berusaha mengembangkan wacana dari beberapa penelitian sebelumnya terkait konfederalisme Demokrasi, seperti yang dijelaskan oleh Immanuel Wallerstein "*Rojava: A Practical Utopia?*" yang diterbitkan di jurnal *New Left Review* pada tahun 2015. Artikel ini membahas pengalaman gerakan kurdi di Rojava dalam membangun sistem politik yang berbasis pada konfederalisme demokrasi. Wallerstein menyoroti pentingnya desentralisasi kekuasaan dan partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan politik, serta peran penting perempuan dalam memimpin dan mengorganisir gerakan tersebut. Selain itu, Wallerstein juga menulis tentang hubungan antara konfederalisme

¹⁹ 'The Meaning of Confederalism | Institute for Social Ecology' <<https://social-ecology.org/wp/1990/11/the-meaning-of-confederalism/>> [accessed 10 October 2022].

²⁰ 'Politik Ekologi Sosial: Murray Bookchin: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive' <<https://archive.org/details/politik-ekologi-sosial/page/54/mode/2up?view=theater>> [accessed 7 January 2023].

demokrasi dan gerakan anti-globalisasi dalam bukunya yang berjudul "*The Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World*".²¹

2.1.2 Teori Post-Anarkisme

Post-anarkisme merupakan perkembangan dari gerakan anarkisme, yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan untuk kebebasan individual dan sosial. Namun, post-anarkisme sendiri mulai terbentuk pada akhir abad ke-20, terutama di Eropa dan Amerika Utara, sebagai respons terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi pada masa itu. Post-anarkisme dianggap sebagai respon terhadap kritik-kritik terhadap pandangan anarkisme klasik yang dianggap terlalu idealis dan tidak realistis. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan post-anarkisme, antara lain: ²²

1. Kritik terhadap anarkisme klasik: Beberapa pemikir post-anarkisme mulai meragukan relevansi pandangan anarkisme klasik, terutama dalam konteks modern yang semakin kompleks dan beragam. Mereka merasa bahwa anarkisme klasik terlalu fokus pada kebebasan mutlak dan penghapusan pemerintahan, sementara masalah sosial yang lebih kompleks dan terkait dengan keadilan sosial tidak terakomodasi.
2. Pengaruh posmodernisme: Beberapa pemikir post-anarkisme dipengaruhi oleh gagasan-gagasan posmodernisme, yang menekankan keberagaman dan kompleksitas realitas sosial dan politik. Dalam pandangan posmodernisme, tidak ada kebenaran atau nilai yang absolut,

²¹ BART VAN KLINK, 'The Utopia of Rojava: A New World for Stateless People', *Onati Socio-Legal Series*, 12.4 (2022), 822–42 <<https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1269>>.

²² Duane. Rousselle and Süreyya. Evren, 'Post-Anarchism : A Reader', 2011, 268.

dan realitas hanya dapat dipahami melalui berbagai interpretasi yang beragam.

3. Masalah sosial dan politik kontemporer: Pemikir post-anarkisme menganggap bahwa anarkisme klasik tidak dapat memberikan jawaban yang memadai atas masalah-masalah sosial dan politik kontemporer, seperti ketimpangan ekonomi, rasisme, seksisme, dan lingkungan hidup.

Post-anarkisme memiliki pengaruh epistemologis dan ontologis yang signifikan terhadap studi hubungan internasional. Secara epistemologis, post-anarkisme menekankan pentingnya kritisisme terhadap pengetahuan dan pemikiran tentang dunia internasional. Post-anarkisme menolak pandangan bahwa pengetahuan dan pemikiran tentang hubungan internasional dapat diterima secara objektif dan netral, karena dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan yang ada. Post-anarkisme juga mengajukan kritik terhadap pandangan realis dan liberal dalam hubungan internasional, yang dianggap terlalu fokus pada negara dan kepentingan nasional. Post-anarkisme memperjuangkan perspektif yang lebih inklusif dan pluralistik, yang mempertimbangkan kepentingan-kepentingan lain seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan lingkungan hidup.²³

Secara ontologis, post-anarkisme menekankan pentingnya pluralisme dan keterlibatan dalam dunia internasional. Post-anarkisme menolak pandangan bahwa dunia internasional harus diatur oleh negara dan lembaga-lembaga internasional yang kuat, dan memperjuangkan

²³ Saul Newman, 'Crowned Anarchy: 1 Postanarchism and International Relations Theory', *Millennium: Journal of International Studies*, 40.2 (2012), 259–78 <<https://doi.org/10.1177/0305829811417229>>.

tatanan internasional yang lebih demokratis dan partisipatif. Post-anarkisme juga menyoroti pentingnya etika dalam hubungan internasional, dan menekankan bahwa tindakan politik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat. Post-anarkisme juga memperjuangkan tindakan politik yang lebih kreatif dan berani, seperti aksi kolektif, gerakan sosial, dan kampanye politik.²⁴

Pengaruh post-anarkisme terhadap studi hubungan internasional dapat dilihat dari munculnya teori-teori kritis yang baru, seperti kritisisme post-struktural, kritisisme neomarksis, dan kritisisme feminis. Teori-teori ini mengeksplorasi kembali konsep-konsep dalam studi hubungan internasional, seperti kekuasaan, identitas, dan ketergantungan, dengan sudut pandang yang lebih kritis dan pluralistik. Pengaruh post-anarkisme juga dapat dilihat dari munculnya gerakan-gerakan sosial yang lebih inklusif dan pluralistik, seperti gerakan anti-globalisasi dan gerakan hak asasi manusia. Gerakan-gerakan ini memperjuangkan tatanan internasional yang lebih adil dan demokratis, serta memperhatikan isu-isu seperti lingkungan, kesejahteraan sosial, dan kesetaraan gender. Namun, pengaruh post-anarkisme juga menghadapi kritik dari kelompok-kelompok yang mempertahankan pandangan klasik realis atau liberal dalam studi hubungan internasional. Kritik tersebut menyoroti potensi kehilangan sifat radikal dan kritis dalam gerakan kritis yang baru, serta potensi penghambatan perjuangan revolusioner untuk penghapusan pemerintahan dan kapitalisme.²⁵

²⁴ Saul Newman, 'Editorial : Postanarchism'.

²⁵ Ibid, Hal. 114

Foucault, dalam tulisannya yang berjudul "*The Mesh of Power*", menggambarkan post-anarkisme sebagai gerakan politik yang mencari kebebasan dan otonomi dengan menghindari kekuasaan yang terpusat. Foucault menekankan pentingnya memerangi kekuasaan yang mengambil bentuk negara dan institusi yang berwenang. Baginya, post-anarkisme mengusung visi masyarakat yang lebih terdesentralisasi dan pluralistik, di mana individu dan kelompok memiliki kebebasan untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa tergantung pada institusi formal.²⁶

Sama halnya menurut Cyhnthia Weber, perspektif post-anarkisme menawarkan alternatif yang lebih inklusif dalam memahami hubungan internasional, karena mengakui bahwa hubungan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh negara, tapi juga oleh masyarakat sipil dan aktor-aktor non-negara. Dalam perspektif post-anarkisme, konsep kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai milik negara, tetapi juga sebagai hubungan sosial yang melibatkan berbagai aktor yang saling berinteraksi. Dalam penelitiannya, Weber juga menekankan pada pentingnya memperhatikan identitas, gender, dan seksualitas dalam hubungan internasional. Weber berpendapat bahwa gender dan seksualitas tidak hanya merupakan kategori sosial yang terpisah dari hubungan internasional, tetapi juga saling terkait dan saling memengaruhi.²⁷

²⁶ Knut G. Nustad and Heather Swanson, 'Political Ecology and the Foucault Effect: A Need to Diversify Disciplinary Approaches to Ecological Management?', *Environment and Planning E: Nature and Space*, 5.2 (2022), 924–46 <<https://doi.org/10.1177/25148486211015044>>.

²⁷ Ryan, Cooper, and Tauer, 'Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26.

Salah satu penelitian Weber yang terkenal adalah bukunya yang berjudul "*Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange*". Dalam buku tersebut, Weber membahas tentang hubungan antara identitas dan kekuasaan dalam konteks hubungan internasional. Ia menekankan pada pentingnya memperhatikan bagaimana negara dan aktor-aktor lain membangun dan merespons identitas sosial, termasuk identitas gender dan seksualitas, dalam mempengaruhi kekuasaan dan tindakan mereka dalam hubungan internasional. Dalam penelitiannya, Weber juga mengkritisi pandangan tradisional dalam studi hubungan internasional yang mengabaikan peran identitas sosial dalam memahami hubungan internasional. Ia menyatakan bahwa identitas bukan hanya sekadar penanda sosial, tetapi juga merupakan sumber kekuasaan dan tindakan dalam konteks hubungan internasional. Pemikiran Cynthia Weber dalam perspektif post-anarkisme menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan reflektif dalam memahami hubungan internasional, dengan mempertimbangkan identitas, gender, dan seksualitas dalam konteks hubungan sosial yang kompleks.²⁸

Dan ada pula beberapa pemikir yang terkait dengan gerakan post-anarkisme adalah Saul Newman, Simon Critchley, Todd May, Lewis Call, dan Richard Day. Pemikiran-pemikiran mereka telah mempengaruhi banyak penelitian di bidang studi hubungan internasional dan politik global. Beberapa penelitian terkait post-anarkisme antara lain "*The Political Theory of Anarchism*" karya April Carter yang dimana post-anarkisme menekankan pada pentingnya memperjuangkan keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat, serta mengakui perbedaan dan

²⁸ Ibid, Hal. 8

keragaman dalam identitas dan pengalaman individu. Pendekatan ini juga menolak gagasan bahwa anarkisme harus berdasarkan pada ideologi atau doktrin yang tetap, dan lebih mengedepankan prinsip-prinsip aksi dan eksperimen dalam menciptakan perubahan sosial.²⁹ "*The Anarchist Roots of Anti-Globalization*" karya David Graeber juga menyoroti Post-anarkisme menekankan pada pentingnya mempertimbangkan perbedaan dalam identitas dan pengalaman individu, serta memperjuangkan kesetaraan dan kebebasan sosial. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya menciptakan aksi kolektif dan eksperimen dalam menciptakan perubahan sosial yang signifikan.³⁰ dan "*Anarchism and International Relations*" karya Randall Amster juga mengatakan pentingnya membangun solidaritas global antara individu dan kelompok yang berjuang untuk keadilan sosial dan lingkungan hidup. Pendekatan ini menolak pendekatan negatif terhadap negara dan institusi politik, dan mengajukan alternatif baru yang lebih inklusif dan terbuka.³¹

Tak lepas dari itu, di wilayah Kurdi Rojava, gerakan-gerakan anarkis dan konfederalisme demokrasi dipraktikkan dalam praktik pemerintahan lokal. Gerakan-gerakan ini mencoba membentuk sebuah masyarakat yang bebas, egaliter, dan berkelanjutan. Mereka menciptakan sistem pemerintahan yang berbasis pada partisipasi aktif dari masyarakat, dan mengutamakan hak-hak minoritas. Pemerintahan lokal di wilayah Kurdi Rojava memungkinkan masyarakat untuk mengambil keputusan

²⁹ 'The Political Theory of Anarchism | The Anarchist Library' <<https://theanarchistlibrary.org/library/april-carter-the-political-theory-of-anarchism>> [accessed 6 April 2023].

³⁰ 'Revolutionary Anarchism and the Anti-Globalization Movement | The Anarchist Library' <<https://theanarchistlibrary.org/library/lucien-van-der-walt-revolutionary-anarchism-and-the-anti-globalization-movement>> [accessed 6 April 2023].

³¹ Zaheer Kazmi, 'Anarchism and International Theory', *Polite Anarchy in International Relations Theory*, 2012, 51–76 <https://doi.org/10.1057/9781137028136_3>.

secara kolektif dan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini juga mendorong pembentukan komunitas yang inklusif, dan mampu mewujudkan kehidupan yang adil bagi seluruh warga masyarakat. Dalam praktiknya, post-anarkisme dan konfederalisme demokrasi saling terkait dan saling menguatkan. Gerakan-gerakan anarkis menekankan pada pentingnya organisasi dan kolaborasi antar komunitas, sedangkan konfederalisme demokrasi menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang inklusif dan mampu menampung banyak perspektif dan kepentingan yang berbeda-beda. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan sebuah masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan bebas.³²

³² Michael Knapp, Anja Flach, and Ercan Ayboğa, *Democratic Confederalism, Revolution in Rojava*, 2017 <<https://doi.org/10.2307/j.ctt1gk07zg.10>>.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini akan berusaha untuk menggambarkan, mencatat, menganalisa suatu fenomena yang terkait dengan permasalahan yang diajukan. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, juga cenderung menggunakan analisis, bersifat deskriptif dan memanfaatkan landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Jenis penelitian kualitatif dimulai dari yang umum kemudian meruncing dan lebih mendetail.

Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif yaitu membuat deskripsi, uraian secara sistematis.

3.2 Kehadiran Penelitian

Pada penelitian ini, penulis bertugas untuk melakukan pengamatan dan menganalisa dari berbagai sumber data dan literatur yang sudah ada sebelumnya. Sumber data atau literatur yang dimaksud ialah referensi seperti buku, jurnal, ataupun skripsi yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat pustaka, maka dari itu dibutuhkan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan untuk menunjang referensi dan informasi. Oleh karena itu, lokasi penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

1. Perpustakaan Universitas fajar
2. Perpustakaan Universitas Hasanuddin
3. Perpustakaan online dari beberapa Universitas di Indonesia

4. Dan berbagai sumber lainnya yang diperoleh secara online

3.4 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, jurnal, artikel, majalah, *handbook*, situs internet, istitusi dan Lembaga terkait. Adapun data dibutuhkan ialah data yang berkaitan dengan penelitian penulis tentang Konfederalisme demokrasi sebagai demokrasi tanpa negara.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode Library Research untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Data-data dapat didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, artikel, serta berbagai media lainnya seperti internet maupun surat kabar harian baik itu cetak maupun online.

3.6 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah Content Analysis. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun data-data lain yang telah dipersiapkan. Selanjutnya data-data tersebut akan dianalisa dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil temuan berdasarkan usaha peneliti dalam penelitian tersebut.

Dengan metode analisis inilah peneliti berusaha untuk menganalisa hasil dari penelitian, yaitu mendeskripsikan tentang Konfederalisme demokrasi sebagai demokrasi tanpa negara

3.7 Pengecekan Validitas Data

Pengecekan validitas data diterapkan dalam penelitian agar data yang diperoleh terjamin keabsahan data. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif sehingga untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3.8 Tahap-Tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan konsep dan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan guna mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan mengenai cara atau metode yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Bab ini

Mencakup rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab yang ada dalam penelitian skripsi ini. Peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca, baik dosen maupun mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Perkembangan Kurdi Rojava

Timur Tengah memiliki tingkat heterogen etnis yang tinggi, hal ini terjadi di Turki menyangkut etnis Kurdi di wilayah perbatasan dengan Irak. Awalnya bangsa Kurdi menempati wilayah pegunungan Anatolia hingga Hormuz yang pada tahun 1500-an, wilayah tersebut menjadi ajang persaingan untuk kekaisaran Turki Ottoman dan Persia-Iran. Konflik di Rojava sendiri sudah dimulai sejak tahun 1916 pasca perjanjian Sykes, Picot, Kurdi dijanjikan diberi otonomi atas wilayah Irak Utara dan Turki Tenggara. Selanjutnya pada 10 Agustus 1920 dalam Perjanjian Sevres, Inggris menjanjikan pemerintah otonom semi-negara pada orang Kurdi, setelah itu muncul perbaharuan perjanjian yaitu Perjanjian Lausanne pada 24 Juli 1923, dalam perjanjian tersebut Inggris tidak lagi menyebut soal negara maupun otonomi Kurdi dan justru membagi Kurdi ke beberapa negara yang meliputi Turki sekitar 10 juta orang Kurdi, Irak sekitar 5 juta orang Kurdi, Iran sekitar 6 juta orang Kurdi dan Syria 1 juta orang Kurdi.³³

Perjalanan sejarah Suku Kurdi yang tersebar di Timur Tengah, tinggal di wilayah perbatasan antar negara dan termajinkan. Perlakuan pemerintah yang buruk terhadap Kurdi seperti yang dilakukan pemerintah Turki yang membuat undang-undang terkait tidak mengakuinya etnis Kurdi yang mengakibatkan puluhan ribu wilayah Kurdi dicabut kewarganegaraannya sehingga juga kehilangan hak akan properti dan

³³ Mesut Yeğen, Uğraş Ulaş Tol, and Mehmet Ali Çalışkan, 'Ethnicity and Elections in Eastern Turkey: What Do the Kurds Want?', *Contemporary Review of the Middle East*, 7.4 (2020), 446–63 <<https://doi.org/10.1177/2347798920939841>>.

jabatannya.³⁴ Seiring berjalannya waktu banyak terjadi pemberontakan bangsa kurdi di berbagai negara yang faktor pemicu difusi pemberontakan yang terkenal di Turki dan hal ini yang menajdi dasar terciptanya wilayah otonom rojava di suria utara Pada tahun 1978, Abdullah Ocallan sendiri mencoba untuk membangun Partai Pekerja Kurdistan (PKK) sebagai gerakan pembebasan Marxis-Leninis yang diharapkan dapat membangun negara sosialis di Kurdistan. Namun pada 12 November 1980, terjadi kudeta yang paling brutal dalam sejarah Turki dan menyebabkan sekitar 650.00 orang di tangkap, sementara ribuan lainnya menghilang ke dalam sejarah.³⁵

Rezim Ba'ath kemudian mengizinkan PKK untuk bermukim kembali di Suriah, dengan alasan mereka dapat menggunakan kelompok itu sebagai pengungkit melawan Turki musuh tradisional Suriah. PKK mendirikan kamp di Damaskus dan di Lebanon yang diduduki Suriah, dimana sekitar empat ratus pejuang mulai berlatih. Namun, hal tersebut tidak seindah yang dibayangkan rezim Ba'ath menindas gerakan Kurdi dan menahan banyak aktivis sebagai tahanan politik. Pada 15 Agustus 1983, PKK memulai perang gerilya melawan negara Kurdi di Kudristan Utara yang diduduki Turki. Ribuan pemuda Kurdi dari Suriah bergabung dengan tentara gerilya PKK baik pria maupun wanita. Selama bertahun tahun PKK mengembangkan kontak dekat warga sipil Kurdi di Suriah. Pada pertengahan 1990-an konflik militer antara PKK dan Turki menemui jalan buntu karena PKK mengeluarkan genjatan senjata untuk mencapai solusi

³⁴ Evangelos Aretaios, *The Rojava Revolution*, *OpenDemocracy*, 2015 <<https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/evangelos-aretaios/rojava-revolution>>.

³⁵ 'Revolution in Rojava | The Anarchist Library' <<https://theanarchistlibrary.org/library/michael-knapp-anja-flach-and-ercan-ayboga-revolution-in-rojava>> [accessed 28 January 2023].

masyarakat sipil Kurdi di Turki namun berhasil di sabotase oleh Turki. Pada akhir 1990-an Turki mengendalikan pasokan air ke Suriah dan mengancam akan berperang dengan Suriah kecuali mereka dapat mengusir PKK. Akhirnya Assad menutup semua kamp PKK dan memaksa Abdullah Ocalan salah satu pemimpin PKK untuk meninggalkan Suriah.³⁶

Reaksi PKK tentu saja meningkatkan perjuangan gerilya dan memutuskan untuk mencari solusi tanpa kekerasan. Pada 15 Februari 1999 Calan di tangkap oleh Mossad di konsulat Yunani di Nairobi, Kenya serta membawanya ke Turki. Di Istanbul, Calan diadili, dihukum dan awalnya dijatuhi hukuman mati. Namun Calan menggunakan proses hukum untuk mempresentasikan inisiatif perdamaian dan menuntut negosiasi. Sebagai niat baiknya ia meminta PKK untuk mundur dari Kurdistan Utara ke Kurdistan Selatan. Calan akhirnya dipenjarakan di pulau Imrali di laut Marmara sebagai salah satunya narapidana. Selama waktu ini, Calan secara kritis menggabungkan teori dan praktik Marxis dan secara intensif mempelajari tulisan-tulisan ahli teori libertarian Murray Bookchin dan sejarawan Immanuel Wallerstein dan Michael Foucault. Tidak lupa Calan juga mempelajari tentang sejarah Timur Tengah, masyarakat Neolitik dan Sumeria Kuno, demokrasi Attic dan organisasi suku kontemporer. Dari sumber-sumber ini kemudian ia kemudian mengembangkan model Konfederalisme Demokratik dan Otonomi Demokratik yang akan diadopsi oleh PKK sebagai perubahan-paradigma dan menjadi dasar revolusi di Rojava.³⁷

³⁶ 'Revolution in Rojava | The Anarchist Library'.

³⁷ 'Revolution in Rojava | The Anarchist Library'.

Bertepatan dengan itu Timur Tengah di landa sebuah fenomena unik yang kemudian dikenal dengan nam Arab Spring. Arab Spring adalah salah satu peristiwa fenomenal yang menerjang negara-negara di Timur Tengah yang mendorong terjadinya revolusi di kawasan tersebut. Peristiwa ini merupakan gelombang protes pro-demokrasi yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2010 dan 2011 yang menolak adanya rezim otoriter di kawasan tersebut. Peristiwa ini dimulai melalui protes di Tunisia dan Mesir yang mendorong dilakukan upaya-upaya serupa di negara arab lainnya. Salah satu negara yang terkena dampak dari Arab spring adalah Suriah, mereka mengalami proses revolusi dalam periode waktu yang cukup lama dibandingkan dengan negara lainnya. Hal ini sendiri disebabkan banyaknya pihak-pihak seperti negara-negara dan kelompok-kelompok terorganisir yang terlibat. Hal ini terus berlanjut dan melahirkan perang sipil di Suriah.³⁸

Munculnya revolusi di Suriah utara memberikan kesempatan pada suku Kurdi dibawah gerakan kebebasan Kurdi untuk mendeklarasikan tujuannya yaitu membangun masyarakat yang nantinya disebut dengan nama “Konfederalisme Demokratik”. Alasan ini menjadi salah satu berdirinya Dewan Rakyat Kurdistan Barat di bawah Partai Persatuan Demokratik (PYD) yang merupakan bagian dari kebebasan Kurdi sebagai payung partisipatif-demokratis bagi keberagaman masyarakat dan aktor politik. Penciptaan serikat atau sistem federal ini dianggap bertentangan dengan konstitusi Suriah. Hal ini sendiri cukup berbeda dengan negara-negara sekitarnya yang cenderung otoritarian dan eksploitatif kapitalis.³⁹

³⁸ ‘Masa Depan Rojava Di Suriah’ <<https://tirto.id/masa-depan-rojava-di-suriah-czH5>> [accessed 2 February 2023].

³⁹ ‘Masa Depan Rojava Di Suriah’.

Sebelum perang yang menghancurkan Suriah Utara atau wilayah Rojava, telah dilakukan selama beberapa dekade eksploitasi kapitalis melalui monokultur gandum, ekstraksi minyak pengabaian perencanaan pengelolaan limbah. Secara bersamaan, pemerintah Turki telah memperluas proyek bendungan di sepanjang sungai yang mengalir ke selatan ke utara Suriah selama beberapa dekade, mengubah sungai menjadi debu dan mempersulit orang untuk menanam makanan dan mandiri. Turki juga membangun tembok besar di sepanjang perbatasannya, mengukir bermil-mil bekas luka melalui hutan kuno di kawasan itu.

Pada musim semi 2011 merupakan dasar daripada perkembangan demokrasi ala Rojava yaitu Konfederalisme Demokratik adapun beberapa peristiwa yaitu ketika gerakan kebebasan Kurdi mendeklarasikan tujuannya untuk membangun masyarakat dengan konsep dari Abdullah Ocalan “Konfederalisme Demokratik”, sedikit yang memperhatikan ketika Partai Persatuan Demokratik (PYD) bagian dari kebebasan Kurdi yang mendirikan Dewan Rakyat Kurdistan Barat sebagai payung partisipatif-demokratis bagi beragam masyarakat dan aktor politik dan Juli 2012 pemberontakan rakyat satu per satu membebaskan kota-kota dan desa-desa Rojava yang sebagian besar dihuni oleh Kurdi dari kediktatoran Ba’ath dan membangun system demokrasi. Selanjutnya pada Januari 2014 tiga kanton Rojava-Cizire, Kobani dan Afrin telah berhasil dikuasai dan mengeluarkan deklarasi Otonomi Demokratik dan dengan menciptakan “administrasi otonom-demokratis agar dapat memastikan system baru tersebut akan inklusif dan pluralistik. Kemudian antara September 2014 dan Januari 2015, pasukan pertahanan revolusi melancarkan perlawanan terhadap ISIS

di Kobani dan mengalahkannya. Hal tersebut menarik perhatian dunia internasional, banyak kelompok revolusioner, demokratis, kiri, sosialis, libertarian dan hak asasi manusia yang kemudian menyadari keradaan wilayah bebas di Rojava Suriah Utara. Rojava kemudian mendeklarasikan dan membentuk system konfederalisme Rojava di Suriah Utara pada maret 2016, hal ini sebagai “jalan ketiga” untuk menghilangkan dominasi rezim Assad dan Chauvisme Islam.⁴⁰

Turki membangun tembok perbatasan antara Turki dan Suriah utara dimana letak Rojava berada tepat di Utara Suriah berbatasan langsung dengan Rojava sehingga menyusahkan suku Kurdi dengan mengisolasi Rojava, Turki juga memperluas proyek bendungan di sepanjang sungai yang mengalir dari selatan ke utara dan baru baru ini Rojava mengeluarkan *#TurkeyOutEfrin* atas embargo ekonomi yang diberlakukannya. Selain itu Suriah juga sebagai rezim yang sangat menentang revolusioner Rojava melakukan segala cara untuk memusnahkan suku Kurdi baik dengan melaukan kerjasama dengan negara yang pro-Suriah ataupun tindakan tindakan menurunkan milisi untuk memerangi Suku Kurdi, karena wilayah Rojava merupakan wilayah lumbung pangan Suriah, 60 persen memproduksi gandum, produksi gandum bisa mencapai 1 juta ton setiap tahun dan hanya 10.000 ton yang dikonsumsi. Suriah melakukan eksploitasi kapitalis menciptakan bencana ekologis melalui monokultural gandum, ekstraksi minyak dan pengabaian perencanaan pengelolaan limbah serta akibat dari embargo dari Turki dan Suriah semua jalur perdagangan Rojava di blokir dan tidak bisa mengekspor gandum.⁴¹ Begitu

⁴⁰ Michael Knapp, Anja Flach, and Ercan Ayboğa, 'Revolution in Rojava', *Revolution in Rojava*, 2017 <<https://doi.org/10.2307/J.CTT1GK07ZG>>.

⁴¹ Knapp, Flach, and Ayboğa, 'Revolut. Rojava'.

pula dengan dengan ISIS yang bertujuan mendirikan negara Islam yang terus menerus melakukan serangan militer dan mengintervensi Rojava.

Dalam artikel yang dituliskan oleh Vittoria Federici "*The Rise of Rojava: Kurdish Autonomy in the Syrian Conflict*" menjelaskan bahwa Kurdi-Suriah memiliki kekurangan dalam sejarah yang dapat memantik mobilisasi nasionalis, kekurangan simbol perjuangan nasional ketika dibandingkan dengan Irak (Halabja Massacre) atau Iran (Republik Mahabad). Sehingga, pembebasan Kobane di tahun 2015 memantik kembali keinginan nasionalis kurdi suriah untuk mengklaim otonomi lewat pencapaian teritori yang lebih luas dari ISIS. Selain itu, pasca pembebasan Kobane, terjadi peningkatan koordinasi yang lebih luas dengan pihak Amerika Serikat, KRG, dan YPG untuk memberikan pengaruh di regional. Salah satu contohnya adalah pembersihan nama YPG di media-media barat dimana dianggap sebagai partner lokal Amerika Serikat melawan ISIS—terlepas afiliasi mereka dengan PYD yang dicap kelompok teroris. Kesimpulan yang ditarik oleh Vittoria Federici adalah proyek pembebasan nasional Kurdi memiliki sedikit peluang untuk bertahan, kecuali PYD melakukan upaya tegas untuk meningkatkan daya tariknya di antara populasi Kurdi dan non-Kurdi di Suriah, sementara juga melibatkan faksi yang lebih moderat dan pragmatis dalam oposisi rezim Suriah.⁴²

Dari penjelasan historiografi politik internasional Rojava, Rojava tidak hadir semerta merta karena momentum yang dihadirkan oleh konflik Suriah, melainkan proses akumulasi konflik, kekerasan, dan pengorganisasian yang telah berlangsung sejak berdekade. Pemahaman

⁴² 'The Rise of Rojava on JSTOR' <<https://www.jstor.org/stable/27000999>> [accessed 2 February 2023].

terhadap proses historis ini dapat memberikan kontribusi untuk memahami kontradiksi dalam dimensi ideologis, kapasitas material, dan konsep-konsep westphalia yang positivistik.

4.2 Konfederalisme Demokrasi Sebagai Instrumen

Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa tanpa perdamaian di Mesopotamia akan sulit bagi daerah lain untuk hidup dalam damai. Perang terbesar dalam sejarah telah terjadi atau memperebutkan wilayah ini. Karena keharmonisan umat manusia tidak stabil di sini. Sampai wilayah ini tidak dipersatukan kembali dengan pemerintahan yang sepenuhnya demokratis yang dibersihkan dari permainan kekuasaan manipulatif, masalah-masalah di wilayah tersebut tidak dapat diselesaikan.⁴³

Konfederalisme demokrasi sebagaimana yang didefinisikan oleh Abdullah Ocalan ialah ekspresi etis, politik dan administrasi masyarakat sebagai struktur historis dan sosiologis dimana identitas faksi dan kelompok yang berbeda hidup berdampingan dalam harmoni dialektis.⁴⁴ Namun secara epistemologis ini sangat berbeda dengan bentuk konfederasi klasik yang dimana bergantung pada kesatuan negara-negara, tetapi konfederalisme demokrasi Ocalan bergantung pada kesatuan konfederasi dari masyarakat. Konfederalisme demokratis adalah solusi utama untuk masalah historis dan sosial yang semakin dalam oleh modernitas kapitalis. Dalam hal ini, ia meramalkan rekonstruksi paradigmatik dari setiap bidang kehidupan masyarakat. Unit fundamentalnya dari reorganisasi kehidupan masyarakat adalah bangsa yang demokratis. Bangsa ini pada dasarnya adalah kesatuan mentalitas.

⁴³ Arnold Toynbee, *Sejarah Umat Manusia*, ed. by Kamdani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁴⁴ 'The Main Principles of Democratic Confederation – ADM'.

Negara-bangsa memantapkan dirinya melalui konstruksi nasionalistik. Ia juga menyebarkan seksisme, agama, dan scientisme dalam konstruksi sistemiknya. Ini membangun formasi ideologis di sekitar singularisasi bahasa, budaya, sejarah dan pasar. Dengan demikian, membentuk realitas virtual di mana bangsa dan individu menjadi pelayan negara. Sekaligus menciptakan panggung demokrasi yang dimainkan secara virtual. Semua ini berfungsi untuk memperdalam krisis sosial daripada menyelesaikannya. Cukup bagi seseorang untuk melihat praktik-praktik negara-bangsa dalam dua abad terakhir untuk memahami kebenaran-kebenaran ini. Pada titik historis saat ini, jelas bahwa negara-bangsa tidak memberi kita model yang layak untuk solusi krisis sosial. Negara demokratis adalah satu-satunya solusi dalam menghadapi masalah ini. Negara demokratis, yang mengorganisir masyarakat dan individu dengan kesadaran demokratis, juga menyatukan budaya lokal dan universal. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat seperti ini telah ada di waktu dan ruang yang berbeda. Selama kekuatan kekuasaan tidak mencampuri dinamika internal dan harmoni alami suatu masyarakat, ia akan selalu berkembang menjadi platform persatuan demokratis.⁴⁵

Ocalan mengatakan konfederalisme demokratis memiliki potensi untuk melampaui hal-hal negatif yang muncul dari sistem negara-bangsa. Ini juga merupakan alat yang efektif untuk politisasi masyarakat. Ini sederhana dan mudah diterapkan. Setiap komunitas, etnis, budaya, kelompok agama, gerakan intelektual, unit ekonomi dapat secara mandiri mengatur dirinya sendiri dan mengekspresikan dirinya sebagai entitas politik. Beginilah seharusnya otonomi dipahami. Setiap entitas memiliki hak

⁴⁵ 'The Meaning of Confederalism | Institute for Social Ecology'.

untuk mengatur dirinya sendiri dari lokal ke universal. Setiap entitas atau unit federasi memiliki hak untuk menerapkan demokrasi langsung pada strukturnya. Dari sinilah semua kekuatannya berasal. Sama seperti negara-bangsa adalah penyangkalan demokrasi langsung, konfederalisme demokratis adalah puncak dari demokrasi langsung.⁴⁶

Konfederalisme Demokrasi juga memiliki 5 point prinsip utama untuk menjaga stabilitas politik ditengah tekanan-tekanan dari kompleksitas konflik yang terjadi di timur tengah antara lain:⁴⁷

1) Hak penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa termasuk hak atas negaranya sendiri. Namun, dasar negara tidak meningkatkan kebebasan rakyat. Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didasarkan pada negara-bangsa telah kembali dipertahankan tidak efisien. Sementara itu, negara-bangsa telah menjadi hambatan serius bagi setiap pembangunan sosial. Konfederalisme demokratis adalah kontras paradigma dari orang-orang tertindas.

2) Konfederalisme demokratis adalah paradigma sosial non-negara. Itu tidak dikendalikan oleh negara. Pada saat yang sama, konfederalisme demokratis adalah cetak biru organisasi kultural dari negara demokratis.

3) Konfederalisme demokratis didasarkan pada partisipasi akar rumput. Proses pengambilan keputusannya berada di tangan masyarakat. Tingkat yang lebih tinggi hanya melayani koordinasi dan pelaksanaan kehendak masyarakat yang mengirimkan utusannya ke majelis umum. Untuk ruang waktu yang terbatas mereka adalah juru bicara dan lembaga

⁴⁶ 'The Main Principles of Democratic Confederalism | The Anarchist Library' <<https://theanarchistlibrary.org/library/komun-academy-the-main-principles-of-democratic-confederalism>> [accessed 7 January 2023].

⁴⁷ Abdullah Ocalan, *Abdullah Ocalan*.

eksekutif. Namun, kekuatan dasar pengambilan keputusan terletak pada lembaga akar rumput setempat.

4) Di Timur Tengah, demokrasi tidak bisa dipaksakan oleh sistem kapitalis dan kekuatan imperialisnya yang hanya merusak demokrasi. Penyebaran demokrasi akar rumput bersifat elementer. Ini adalah satu-satunya pendekatan yang dapat mengatasi keragaman kelompok etnis, agama, dan perbedaan kelas. Ini juga sejalan dengan struktur konfederasi tradisional masyarakat.

5) Konfederalisme demokratik di Kurdistan juga merupakan gerakan antinasionalis. Ini bertujuan untuk mewujudkan hak perlindungan diri rakyat melalui pemajuan demokrasi di seluruh wilayah Kurdistan tanpa mempersoalkan batas-batas politik yang ada. Tujuannya bukanlah fondasi negara bangsa Kurdi. Gerakan ini bermaksud untuk mendirikan struktur federal di sebagian Kurdistan. 34 Iran, Turki, Suriah, dan Irak yang terbuka untuk semua orang Kurdi dan pada saat yang sama membentuk konfederasi payung untuk keempatnya.

4.2.1 Konfederalisme Demokrasi Versus Negara-Bangsa

Bencana yang dibawah oleh perang dunia 1 telah menimbulkan bencana yang sangat kritis melihat modernitas dan pencapaiannya. kemajuan humanis yang diyakini banyak orang akan terjadi berkembang dalam terang modernitas tersandung ke dalam dalam kekacauan. Manusia ini telah membuat bencana melepaskan kecurigaan besar terhadap klaim modernitas.

Gagasan bahwa ketentuan Perdamaian Westphalia tahun 1648 mendasari seluruh sistem modern hubungan internasional adalah hal biasa dari sebagian besar arus dalam teori hubungan

internasional dan merupakan bagian dari fondasi sejarah yang dibangun oleh pendukung mereka. Menurut gagasan ini, kesimpulan dari Perjanjian Perdamaian Westphalian memunculkan perubahan struktural dalam sifat hubungan antarnegara, akibatnya mekanisme hubungan antarnegara juga berubah secara radikal yang disebut negara Westphalia menjadi aktor utama dalam hal ini. Hubungan, fitur utamanya adalah kedaulatan eksternal absolut. Hal ini, pada gilirannya, mengarah pada pembentukan konsep westphalia, yang prinsip dasarnya adalah kesetaraan negara sebagai subjek hubungan internasional. Perang Tiga Puluh Tahun (1618–1648), yang diakhiri dengan Perdamaian Westphalia, masing-masing dipandang sebagai konflik eksistensial antara monarki Habsburg abad pertengahan, yang mencoba menerapkan proyek universalis di dalam kekaisaran, dan komunitas negara bangsa, yang akhirnya menang dan memungkinkan pembentukan negara modern.⁴⁸

Kondisi politik modern pula disebut-sebut tetap dicirikan oleh ketidak-berakaran ini, sebagai fondasi pengganti bagi pelandasan tatanan politis di alam, bangsa, dan rasio yang gagal untuk menyebarkan damai dan keamanan yang mereka janjikan.⁴⁹ Dalam pentransformasian tatanan politis yang menyertai transisi dari abad pertengahan ke abad modern, negara berdaulat menjadi dominan. Sistem-sistem baru perepresentasian dan tatanan-tatanan semiotik dan simbolik baru yang dibutuhkan untuk memberikan penandaan

⁴⁸ M Çağrı Inceoğlu, 'Arendt's Critique of The Nation-State in The Origins of Totalitarianism', *Journal of Yasar University*, 3.10 (2008), 1331–44.

⁴⁹ Michael Dillon, *Dekonstruksi Politik Internasional*, ed. by Jenny Edkins and Nick Vaughan-Williams, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

hidup dan kekuasaan terhadap entitas politis baru yang muncul juga dilembagakan. Negara membuat penampakan terdalamnya, menurut paradigma Hobbes, sebagai *persona ficta* dan *persona magna*.⁵⁰ Yang dimana dapat dikatakan bahwa Hobbes ingin orang-orang mematuhi kehendak penguasa tentang masalah apa yang benar dan salah karena dia berpikir penguasa akan memiliki pengetahuan yang berbeda tentang sifat manusia dan akibatnya tentang hukum moral perilaku yang baik.⁵¹

Hobbes dan Machiavelli juga sebagaimana mengkonseptualisasikan negara sebagai satu-satunya mekanisme yang menyediakan keamanan bagi individu dan melegitimasi kewajiban politik atas dasar ini, sedangkan bagi Machiavelli kepatuhan pada kekuasaan yang berdaulat adalah tujuan itu sendiri.⁵² Perspektif epistemologis positivis ini cenderung melemahkan sifat manusia atau individu yang berada dalam suatu negara, pemikiran ini gagal menjawab kompleksitas konflik yang hadir diberbagai penjuru dunia terkhusus yang berada di timur tengah. kumpulan individu dan sejarah telah menyaksikan pengalaman yang sangat berbeda. Hasil waktu mengarah ke gagasan budaya, warisan, dan identitas yang sangat berbeda.⁵³ Akibatnya konsep negara bangsa memunculkan ide dan konsep identitas nasional yang mutlak dan mengilusi romantisme pada individu atau masyarakat suatu negara.

⁵⁰ Ibid, hal. 77

⁵¹ Funda Gen and L U Onba, 'Morality in Machiavelli , Hobbes and Locke ', 2013, 25–40 <<http://www.flsfdergisi.com/sayi15/25-40.pdf>>.

⁵² Ibid, Hal. 36

⁵³ Discourses Of, Nineteenth Century, and Paradigms O F Western, 'Kyle Owen Willard', XII.2016.

Tampaknya negara bangsa sebagai individualistis, mementingkan diri sendiri, dan kompetitif dalam sistem internasional membenarkan dirinya sebagai kebajikan tertinggi di bawah hukum kedaulatan independen dalam dunia tak terlihat yang penuh penderitaan dan kekurangan apakah ini disebabkan oleh bencana alam, politik yang korup, rezim, penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, kejahatan murni demi kejahatan, perdagangan manusia, atau penataan institusi ekonomi global yang tidak adil, dan perbedaan relatif-mutlak digunakan untuk memisahkan tugas kemanusiaan dari kewajiban moral lainnya dan menjadikannya absolut. Karenanya negara-bangsa juga mutlak, tetapi ketidakadilan yang parah jelas masih ada.

Mengenai ketidakadilan global yang hadir akibat kekeliruan negara-bangsa, penulis mengingat artikel "The Problem of Global Justice", Thomas Nagel yang membuka teksnya mengakui pentingnya *The Law of Peoples* karya Rawls untuk debat kontemporer tentang keadilan global mengingat warisan tradisi Hobbesian tentang kepentingan pribadi negara-bangsa. Bagi Nagel, negara-bangsa adalah 'lokus' yang mantap, tak tergoyahkan, dan percaya diri bagi teori politik domestik untuk mengeksplorasi masalah keadilan. Namun, ketika kita memikirkan skala keadilan global, sulit untuk membayangkan entitas yang sebanding dengan entitas negara-bangsa yang dapat melakukan fungsi serupa. Ketika berbicara tentang tatanan internasional, pertanyaan tentang keadilan biasanya berurusan dengan dengan tindakan kriminal negara-negara tertentu, misalnya pembersihan etnis, masalah

reparasi dan bantuan di negara-negara yang dilanda perang atau perang sipil sebelumnya, aturan internasional untuk ekonomi dan perdagangan pasar kapitalis global, bantuan untuk bantuan kemanusiaan setelah bencana alam, dan tanggapan terhadap pelanggaran hak asasi manusia individu, khususnya hak yang melibatkan kebebasan politik dan sipil berdasarkan kebebasan positif dan negatif. Apa pun seperti hak atas bebas dan keluar dari dominasi negara bangsa tampaknya dibayangi oleh perhatian lain yang mendominasi ini.⁵⁴

Menurut Nagel ketidakadilan dalam masyarakat domestik maupun global katakanlah masalah ketidaksetaraan ras, etnis, gender atau pendapatan gagal dijelaskan dan diselesaikan oleh pemikir seperti Hobbes, Machiavelli, Locke dan beberapa pemikir positivis lainnya.⁵⁵ Mengingat pembahasan ini mengenai Konfederalisme demokrasi sebagai wajah dan alternatif politik baru. Kemudian menawarkan keadilan dan kesetaraan hak masyarakat domestik yang terjadi di Kurdi-Rojava.

Masyarakat adalah organisme hidup, itu historis dan multi-faceted. Oleh karena itu wajar bagi masyarakat untuk melihat berbagai kecenderungan dan preferensi politik.⁵⁶ Konfederalisme demokratis memungkinkan kecenderungan yang berbeda ini ada secara harmonis dalam kerangka demokrasi radikal tanpa mengubahnya menjadi kesempatan untuk konflik dan kekerasan.

⁵⁴ Rajesh Sampath, 'The Idea of the Nation-State as an Obstacle to the Right to Global Development', *IAFOR Journal of Arts & Humanities*, 3.1 (2015) <<https://doi.org/10.22492/ijah.3.1.02>>.

⁵⁵ Ibid, Hal. 8

⁵⁶ Dillon.

Jika keharmonisan alami dan dinamika internal masyarakat tidak dimanipulasi oleh elit eksternal yang menekan maka semua jenis masalah dapat diselesaikan melalui diskusi dalam suasana damai. Jika ini masalahnya, maka semua kelompok etnis, agama, budaya, sosial dan gender dapat hidup berdampingan di antara lembaga-lembaga politik lokal dan pusat yang tertanam dengan prinsip-prinsip politik demokratis. Tidak ada masalah sosial yang tidak dapat diselesaikan dalam masyarakat demokratis radikal dengan demokrasi langsung melalui majelis lokal. Ini adalah masyarakat di mana individu dan komunitas bebas dapat dengan bebas mengatur diri mereka sendiri tanpa tekanan yang menekan, hegemonik, manipulatif dari lembaga elit. Intinya, persatuan dalam keberagaman dan keberagaman dalam persatuan bukanlah utopia, melainkan realitas masyarakat.⁵⁷

4.2.2 Dari Bookchin Ke Ocalan : Munisipalisme Libertarian Dan Konfederalisme Demokrasi

Sejauh ini, kita selalu diberitahu oleh realita global yang terjadi, bahwa kita hidup di masa perubahan politik dan sosial yang dramatis dan meluas. Munculnya identitas politik khas Eropa, dan ledakan pertumbuhan teknologi dan bentuk komunikasi baru, hingga kebangkitan kembali identitas nasional dan etnis secara luas, serta perang dan genosida yang tampaknya menjadi konsekuensi dari ini, semua tampaknya menunjukkan bahwa masa kita adalah masa perubahan radikal.

⁵⁷ Imemo Journal, '© 2019 Г. А. Куприянов', 3, 2019, 37–50 <<https://doi.org/0.20542/afij-2019-3-37-50>.DOI>.

Munisipalisme Libertarian bukan hal baru dalam praktik revolusioner dan praktik demokrasi langsung, Gagasan ini lebih jauh Pada abad 7 SM, Attica pusat kota Athena dan wilayah sekitarnya adalah tempat permusuhan kelas yang tajam. Sekelompok kecil keluarga aristokrat menguasai kawasan ini, sementara sejumlah besar kaum petani kecil hidup sebagai budak. Kaum petani yang tertindas diwajibkan membayarkan sebagian hasil panen tahunannya kepada para majikan mereka. Ini keharusan yang kerap menjerumuskan mereka kedalam hutang dan kemiskinan parah. Mayoritas orang biasa dibebani hutang yang harus mereka bayar kepada segelintir orang kaya. demikian dikabarkan oleh Plutarch. Jika hutang tidak dibayar, akibatnya seringkali sangat mengerikan. Dalam situasi yang bengis ini, demos kata yang acap kali digunakan untuk merujuk pada orang awam dan rakyat sebagai satu kesatuan mendekati tepian revolusi. Keputusan memaksa mereka mencari sosok yang akan membebaskan para penghutang yang diperbudak, meredistribusikan tanah dan melakukan reformasi total terhadap konstitusi.⁵⁸

Perang sipil yang sengit sepertinya sudah diambang pintu untuk meledak di Attica. Namun akhirnya, pada 594 SM, segenap klan yang berjuang sepakat memilih Solon sebagai archon atau pimpinan mereka, untuk mewujudkan ketertiban di polis tersebut. Solon memulai langkahnya dengan menghapuskan semua hutang yang belum dilunasi dan menyatakan perbudakan hutang

⁵⁸ Plutarch and Ian Scott-Kilvert, *The Rise and Fall of Athens*, 1960.

sebagai ilegal. Solon dipilih dengan tugas luar biasa yaitu untuk mengubah konstitusi dan mencegah timbulnya krisis baru. Begitulah, hukum-hukum yang dia berlakukan secara resmi telah mengubah struktur politik kota itu secara radikal yang mendorong dia mengembangkan konstitusi yang sama sekali baru. Solon membangkitkan kembali ecclesia, majelis rakyat yang pernah ada pada jaman-jaman kesukuan namun menghilang pada abad-abad berikutnya. Pada masa itu Solon memulihkan kembali eklesia namun juga memperluas fungsinya yang berbarengan dengan diperoleh kembalinya otoritas majelis tersebut untuk membuat hukum-hukum komunitas, memilih para pemimpinnya dan menggelar pertemuan rutin atas kehendak mereka sendiri. Akhirnya, archon baru memberi khalayak hak yang bukan hanya untuk menghadiri rapat-rapat eklesia melainkan juga memberikan suara terhadap isu-isu yang dirundingkan disana. Ini langkah krusial menuju pemberdayaan demos.⁵⁹

Satu milenium kemudian, lama setelah keruntuhan polis Athena, Imperium Romajatu dan sistem feodal menghantui nyaris seluruh daratan Eropa. Kendati orang-orang Romawi telah mendirikan banyak kota kecil di Eropa, kota-kota itu bukan lagi merupakan wadah aktivitas politik. Gereja secara fisik melestarikan banyak kota, tetapi semata-mata sebagai pusat-pusat kekuasaan kependetaan. Namun sesudah tahun 1000 M, di utara Italia, di lembah Rhone, Rhineland dan Flanders, mulai muncul kelas pedagang baru disela-sela feodalisme. komune-komune ini

⁵⁹ Ibid, Hal. 54

kemudian menuntut bahwa kedaulatan mereka pun harus termasuk kemerdekaan-kemerdekaan lokal, tuntutan-tuntutan yang biasanya ditolak oleh kekuasaan gereja dan para pangeran. Pada gilirannya, selama abad 12 banyak komune yang mulai membebaskan diri dari kekuasaan tersebut. Di utara Italia sekelompok kota yang menamakan dirinya Liga Lombard memberontak melawan Imperium Romawi Agung untuk memperoleh kemerdekaan. Melalui Perjanjian Perdamaian Constance yang ditandatangani pada 1183, Imperium memberikan pengakuan kepada beberapa kota dalam liga tersebut dan mengizinkan mereka memilih pejabat-pejabatnya sendiri, membuat hukum-hukum lokalnya dan terutama memerintah diri mereka sendiri.⁶⁰

Proses demokratisasi ini juga tidak bertahan lama pada masanya, bentuk-bentuk demokrasi yang paling awal ini mengalah pada bentuk-bentuk pemerintahan republik dan kekuasaan politik kembali kepada keluarga-keluarga berpengaruh yang akhirnya mengakibatkan komune-komune itu berakhir dalam kekuasaan dewan-dewan oligarki atau elit-elit. Betapapun belum sepenuhnya demokratisasi pada komune-komune abad pertengahan, namun telah membuat dunia politik yang terbengkalai bangkit dari tidurnya dan bergerak selama beberapa abad di taman-taman umum dan ruang-ruang publik lainnya. Komune-komune ini dengan demikian membentuk peristiwa penting dalam tradisi yang tengah berkembang, yakni tradisi demokrasi langsung.

⁶⁰ 'Italy - Institutional Reforms | Britannica'
<<https://www.britannica.com/place/Italy/Institutional-reforms#ref318336>> [accessed 7 February 2023].

Munisipalisme liberarian yang digagaskan oleh Boockhin bukan hal baru dalam tradisi politik. Namun, secara epistemologis Boockhin menggagaskan munisipal libertarian berbeda dari beberapa praktik demokrasi langsung sebelumnya. Munisipalisme libertarian tidak menerima gagasan konvensional bahwa Negara beserta sistem pemerintahan yang menjadi khas negara-negara Barat dewasa ini adalah betul-betul demokratis. Sebaliknya, teori ini menganggap negara-negara tersebut sebagai Negara-Negara republik yang berkeinginan menjadi demokratis. Negara-Negara republik memang lebih demokratis ketimbang jenis-jenis Negara lainnya seperti monarki dan kediktatoran, karena Negara-Negara macam ini memiliki berbagai macam lembaga perwakilan. Namun Negara-negara ini mendirikan struktur dominasi tempat segelintir orang berkuasa atas mayoritas. Negara pada hakikatnya, secara struktural dan profesional, terpisah dari khalayak umum. Dalam kenyataannya ia ditegakkan di atas orang-orang biasa, laki-laki dan perempuan. Ia menjalankan kekuasaan atas rakyat dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kekuasaannya pada akhirnya toh bersandar pada kekerasan. Negara juga melegalkan penggunaan monopoli dalam bentuk angkatan bersenjata dan kepolisian.⁶¹

Dalam struktur dimana kekuasaan didistribusikan secara tidak merata, demokrasi adalah hal yang mustahil. Jauh dari mewujudkan kedaulatan rakyat, bahkan sebuah Negara republik bertentangan dengan kedaulatan rakyat. Munisipalisme libertarian

⁶¹ 'Politik Ekologi Sosial : Murray Bookchin : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive'.

mengembangkan sejenis demokrasi yang bukan semata-mata kekuasaan Negara. Demokrasi yang dikembangkannya adalah demokrasi langsung di dalamnya semua warga dalam komunitas-komunitas mengelola urusan mereka sendiri melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam pertemuan langsung (*face to face*), yang berbeda dengan yang dilakukan Negara terhadap warganya. Tidak seperti teori-teori demokrasi perwakilan, munisipalisme libertarian membedakan secara tajam antara politik dengan ke Negara-an. Dalam penggunaannya yang konvensional, konsep-konsep ini memang agak mirip. Politik, sebagaimana kita pahami seperti biasanya, merupakan komponen penting bagi sistem perwakilan dalam pemerintahan. Ia adalah seperangkat prosedur dan praktik yang dengannyalah rakyat memilih sekelompok kecil individu para politisi untuk berbicara dan mewakili mereka dalam lembaga legislatif atau eksekutif.⁶²

Kendati memiliki kemampuan untuk berubah dalam praktik konvensionalnya, politik sama sekali tidaklah serupa dengan ke Negara-an. Negara juga bukanlah bidang alami politik. Pada abad-abad yang lalu, sebelum kemunculan Negara-Bangsa, politik dipahami sebagai aktivitas warga dalam sebuah badan publik yang diberdayakan dan dilaksanakan bersama melalui institusi-institusi partisipatif. Berbeda dengan Negara, politik sebagaimana adanya dan sebagaimana jadinya, secara langsung bersifat demokratis. Sebagaimana dikembangkan oleh munisipalisme libertarian, politik adalah pengelolaan langsung atas urusan-urusan komunitas oleh

⁶² Ibid, Hal. 12

para warga melalui institusi-institusi demokratis yang bersifat *face-to-face*, terutama berupa majelis rakyat. Demokrasi langsung adalah unsur pokok dalam tradisi politik sehingga masyarakat Barat mengklaim sangat menghargai sistem ini. Demokrasi langsung merupakan unsur paling mendasar dalam politik, karena tradisi politik demokratis berasal bukan dari Negara-Bangsa melainkan dari demokrasi berhadap-hadapan wajah di Athena kuno pada pertengahan abad kelima sebelum Masehi. Politik sebagaimana pertama kali digambarkan dalam tulisan-tulisan Aristoteles, pada mulanya merupakan demokrasi langsung. Kata politik secara etimologis berasal dari kata polis, kata Yunani kuno yang umumnya disalahartikan sebagai “negara-kota” yang berarti publik, sebuah dimensi partisipatif dalam komunitas.⁶³

Proyek munisipalisme libertarian berupaya menyadarkan politik kembali ke makna asal katanya membangun dan mengembangkan demokrasi langsung lokal, yakni bahwa warga membuat keputusan-keputusan bagi komunitas dan masyarakat mereka sendiri sebagai suatu keutuhan. proyek munisipalisme libertarian tidak berjalan diatas selubung “demokratis” Negara dengan bekerja untuk “reformasi demokrasi”, yaitu proyek yang menganjurkan laki-laki dan perempuan agar aktif berpartisipasi dalam sebuah struktur yang dicocokkan untuk mengontrol mereka. Munisipalisme libertarian justru merupakan

⁶³ Ibid, Hal. 18

antitesis terhadap Negara karena Negara tidak selaras dengan swakelola komunitas dan kehidupan sipil yang berkembang.⁶⁴

Tujuan munisipalisme libertarian adalah membangkitkan kehidupan sipil yang telah hilang dengan begitu cepat dan mentransformasikannya ke ranah politik. Ia hendak melahirkan warga aktif keluar dari konstituen pasif dan memberi mereka konteks politik dimana mereka memiliki pilihan-pilihan berarti. Ia juga bertujuan menciptakan konteks ini dengan melembagakan kekuatannya dalam majelis lingkungan dan rapat-rapat kota. Dalam pengertian yang sangat radikal, munisipalisme libertarian kembali ke akar politiknya, yaitu membangkitkan demokrasi langsung dan mengembangkannya, dengan nilai-nilai yang rasional dan etis beserta praktik-praktik yang mendukungnya.⁶⁵

Secara ontologis inilah yang menjadi akar dari buah pemikiran Boockhin yang kemudian menginspirasi Abdullah Ocalan sebagai tokoh revolusioner Kurdi-Rojava, dengan demikian konfederalisme demokrasi Ocalan tidak jauh dari praktik demokrasi langsung yang dimaksudkan Boockhin, pemahaman demokrasi ini membuka ruang politik bagi semua lapisan masyarakat dan memungkinkan terbentuknya kelompok politik yang berbeda dan beragam. Dengan cara ini juga memajukan integrasi politik masyarakat secara keseluruhan. Politik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.⁶⁶

⁶⁴ Ibid, Hal. 27

⁶⁵ Ibid, Hal. 27

⁶⁶ Knapp, Flach, and Ayboğa, *Democratic Confederalism*.

Prinsip luas organisasi politik dan sosial yang bisa melembagakan interdependensi tanpa melibatkan Negara dan pada saat yang sama juga mempertahankan kuasa majelis municipal adalah konfederalisme. Konfederasi merupakan jaringan dimana beberapa kesatuan politik bergabung membentuk kesatuan yang lebih besar. Kendatipun kesatuan yang lebih besar dibentuk dalam proses berkonfederasi, kesatuan-kesatuan yang lebih kecil tidak melarutkan diri kedalamnya dan menghilang. Tetapi mereka justru melestarikan kebebasan, identitas dan kedaulatannya bahkan ketika mereka berkonfederasi.⁶⁷ Namun sejauh ini mesti ditegaskan struktur konfederalisme secara historis bukanlah hal baru.

Kota-kota pada masa awal pencatatan sejarah telah mendirikan asosiasi-asosiasi konfederal, sebagaimana yang terjadi di Mediterania kuno dan daratan Eropa abad pertengahan. Pada awal periode modern, konfederasi memperoleh peran penting sebagai alternatif utama bagi Negara-Bangsa, sebelum Negara-Bangsa menjadi lumrah seperti dewasa ini. Menurut Ocalan, komposisi masyarakat yang kontradiktif membutuhkan kelompok politik dengan formasi vertikal dan horizontal. Kelompok-kelompok pusat, daerah dan lokal perlu diseimbangkan dengan cara ini. Hanya mereka, masing-masing untuk dirinya sendiri, yang mampu menghadapi situasi konkret khusus dan mengembangkan solusi yang tepat untuk masalah sosial yang menjangkau jauh. Merupakan hak alami untuk mengekspresikan identitas budaya, etnis, atau

⁶⁷ 'The Main Principles of Democratic Confederation – ADM'.

nasional seseorang dengan bantuan asosiasi politik. Namun, hak ini membutuhkan masyarakat etis dan politik.⁶⁸

Dalam konfederalisme demokratis tidak ada ruang untuk segala jenis perjuangan hegemoni. Hal ini terutama berlaku di bidang ideologi. Hegemoni adalah prinsip yang biasanya diikuti oleh jenis peradaban klasik. Peradaban demokratis menolak kekuatan dan ideologi hegemonik. Setiap cara berekspresi yang melintasi batas-batas administrasi diri yang demokratis akan membawa administrasi diri dan kebebasan berekspresi menjadi absurd. Penanganan kolektif atas masalah-masalah masyarakat membutuhkan pemahaman, penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan cara pengambilan keputusan yang demokratis. Hal ini berbeda dengan pemahaman kepemimpinan dalam modernitas kapitalis di mana keputusan-keputusan birokratik yang sewenang-wenang berkarakter negara-bangsa bertentangan secara diametris dengan kepemimpinan demokratik konfederasi sejalan dengan landasan etika.⁶⁹ Dalam lembaga kepemimpinan konfederalisme demokratis tidak perlu ada legitimasi ideologis.

Namun konfederalisme demokrasi tak hanya menjadi perbincangan skala lokal, menurut Ocalan Meskipun dalam konfederalisme demokratis fokusnya adalah pada tingkat lokal, pengorganisasian konfederalisme secara global tidak dikecualikan. Sebaliknya, kita perlu memasang platform masyarakat sipil nasional dalam bentuk majelis konfederasi untuk menentang Perserikatan

⁶⁸ Knapp, Flach, and Ayboğa, *Democratic Confederalism*.

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 30

Bangsa-Bangsa sebagai asosiasi negara-bangsa di bawah kepemimpinan negara-negara adidaya. Dengan cara ini kita bisa mendapatkan keputusan yang lebih baik dengan maksud untuk perdamaian, ekologi, keadilan dan produktivitas di dunia.⁷⁰

Praktik konfederalisme demokrasi Ocalan menjadi berita gembira untuk Boockhin, dalam hal ini praktiknya di kurdi-rojava dapat digambarkan semacam administrasi berbeda dengan administrasi oleh negara bangsa. Namun, dalam keadaan tertentu hidup berdampingan secara damai dimungkinkan selama negara-bangsa tidak mencampuri urusan utama pemerintahan sendiri. Semua intervensi semacam itu membutuhkan pembelaan diri dari masyarakat sipil. Konfederalisme demokratis tidak berperang dengan negara-bangsa mana pun, tetapi tidak akan berpangku tangan pada upaya asimilasi. Penggulingan revolusioner atau pendirian negara baru tidak menciptakan suatu perubahan yang dapat dipertahankan. Dalam jangka panjang, kebebasan dan keadilan hanya dapat dicapai dalam proses dinamika demokratik-konfederasi.⁷¹

Namun, ini tidak berarti bahwa serangan oleh negara-bangsa harus diterima. Konfederasi Demokrasi akan mempertahankan kekuatan pertahanan diri setiap saat. Konfederasi demokratisi tidak akan dibatasi untuk mengatur diri mereka sendiri dalam satu wilayah tertentu. Mereka akan menjadi konfederasi lintas batas ketika masyarakat yang bersangkutan menginginkannya. Dari

⁷⁰ Ibid, Hal. 31

⁷¹ Ibid, Hal. 32

wacana Boockhin ke Ocalan, penulis kemudian sangat tertarik dengan beberapa pemikiran Saul Newman untuk lebih menelanjangi kegagalan dari konsep-konsep westphalia. Menurutnya, Negara dibutuhkan untuk eksistensi subyek penentangannya, dan sebaliknya, eksistensi negara juga membutuhkan subyek tersebut. Sesuatu mendefinisikan dirinya dengan berposisi dengan yang lain. Kemurnian identitas anarkis hanya didefinisikan dengan mengkontraskannya dengan ketidakmurnian kekuasaan politik. Ketika hubungan di antara negara dan subyek anarkis adalah jelas terdefinisikan sebagai oposisi, kedua antagonis tersebut tidak dapat eksis di luar hubungan tersebut. Hal ini memberikan teori anarkis sejenis titik berangkat yang tidak terkontaminsi dengan kata lain menempati posisi istimewa di luar orde kekuasaan, dari mana kekuasaan dapat dikutuk sebagai yang tidak bermoral dan tidak rasional. Hubungan paradoks tersebut dapat dilihat sebagai suatu bentuk resentimen dalam pengertian Nietzschean.⁷²

4.3 Post-Anarkisme Sebagai Suatu Orientasi Politik

Post-anarkisme adalah pandangan politik yang muncul sebagai tanggapan terhadap kelemahan teori dan praksis anarkisme tradisional. Pandangan ini berkembang pada akhir abad ke-20 dan terus berkembang hingga saat ini. Anarkisme sendiri adalah sebuah gerakan politik yang muncul pada abad ke-19 di Eropa dan Amerika Utara, yang menolak sistem pemerintahan dan hierarki dalam masyarakat. Anarkisme bertujuan untuk membangun masyarakat yang egaliter, terdesentralisasi, dan

⁷² Rousselle and Evren.

didasarkan pada partisipasi masyarakat. Namun, seiring perkembangan waktu, gerakan anarkisme mengalami beberapa kelemahan, seperti kurangnya kemampuan untuk mengatasi pertentangan dalam gerakan sendiri, kekurangan dalam mengembangkan strategi politik yang efektif, serta kurangnya kesadaran terhadap keragaman sosial dan budaya.⁷³

Pada akhir abad ke-20, sekelompok teoretikus anarkisme seperti Hakim Bey, Saul Newman, dan Lewis Call mulai mengembangkan pandangan politik baru yang disebut post-anarkisme. Pandangan ini menekankan pada pentingnya memperluas pandangan anarkisme tradisional dengan mengakui kompleksitas sosial dan budaya, serta kerangka kerja yang beragam. Pandangan ini juga menekankan pada pentingnya memperhatikan kekuasaan dan pengaruh yang tersembunyi dalam masyarakat, dan memperjuangkan pengembangan strategi politik yang berbasis pada partisipasi dan pengorganisasian masyarakat. Pada tahun 1999, gerakan anarkisme mengalami puncaknya dalam Aksi Protes Seattle, di mana ribuan aktivis anarkis turun ke jalan-jalan untuk memprotes Pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Meskipun aksi ini sukses dalam memperjuangkan tuntutan mereka, gerakan anarkisme juga mengalami kontroversi dalam aksi ini, seperti penggunaan taktik kekerasan dan merusak properti publik. Sejak saat itu, gerakan anarkisme telah terus berkembang dan mengalami evolusi, termasuk perkembangan pandangan post-anarkisme. Pandangan ini menjadi populer di kalangan aktivis sosial dan politik yang ingin memperluas pandangan anarkisme dan menemukan cara untuk memperjuangkan perubahan sosial yang inklusif dan partisipatif. Meskipun pandangan ini tidak sepenuhnya

⁷³ Jennifer Brier and lia dwi jayanti, *Post-Anarchism A Reader*, 2020, XXI <<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>.

menggantikan pandangan anarkisme tradisional, pandangan ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas pandangan gerakan anarkisme dan memperjuangkan perubahan sosial yang lebih luas.⁷⁴

Konsep post-anarkisme sering dikaitkan dengan pandangan anarkisme pasca-modern, pos-anarkisme, atau anarkisme reflektif. Pandangan post-anarkisme tidak hanya menganggap anarkisme sebagai suatu ideologi politik, melainkan juga sebagai pendekatan kritis terhadap sosial-politik yang melibatkan pemikiran dan praktik yang sangat kompleks. Post-anarkisme menolak pandangan anarkisme tradisional yang mengutamakan revolusi atau perubahan sosial secara tiba-tiba dan bersifat absolut. Pandangan post-anarkisme juga mengakui bahwa realitas sosial-politik yang kompleks memerlukan pendekatan yang fleksibel dan tidak dogmatis, dan memperjuangkan partisipasi politik yang lebih luas dalam bentuk yang lebih inklusif. Menurut Todd May Post-anarkisme adalah sebuah pendekatan kritis terhadap politik yang mengakui kompleksitas sosial dan budaya serta kerangka kerja yang beragam. Konsep ini menganggap anarkisme bukan hanya sebagai suatu ideologi politik, melainkan juga sebagai pendekatan kritis terhadap sosial-politik yang sangat kompleks.⁷⁵

Sama halnya yang dimaksudkan Foucault dalam buku "*Postmodern Anarchism*" yang dituliskan Lewis Call menurutnya, Foucault juga menolak pandangan bahwa kekuasaan hanya dimiliki oleh negara atau lembaga-lembaga resmi lainnya. Sebaliknya, Foucault menggambarkan kekuasaan sebagai suatu fenomena yang tersebar di seluruh masyarakat, yang

⁷⁴ Postmodern Anarchism, *Postmodern Anarchism*.

⁷⁵ Todd May, 'Poststructuralist Anarchism', May, 1994.

melibatkan semua orang sebagai pengguna dan sasaran kekuasaan. Oleh karena itu, dalam pemikiran post-anarkis, kekuasaan dianggap sebagai suatu realitas yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang, bukan hanya oleh negara atau penguasa.⁷⁶

tandingan Post-anarkisme dapat dipandang sebagai metodologi tandingan dalam studi hubungan internasional karena pandangan ini menolak pandangan tradisional yang memisahkan negara dari aktor-aktor lain dalam sistem internasional. Post-anarkisme mengakui bahwa sistem internasional tidak hanya terdiri dari negara-negara, melainkan juga aktor-aktor non-negara seperti organisasi internasional, gerakan sosial, dan individu-individu yang terlibat dalam dinamika internasional. Sebagai metodologi tandingan, post-anarkisme menekankan pada pentingnya mengakui kompleksitas sosial dan budaya, serta memperluas kerangka kerja dan pandangan dalam memahami dinamika internasional. Pandangan ini juga menolak pandangan deterministik yang menganggap bahwa tindakan-tindakan manusia selalu terikat pada struktur sosial dan politik yang ada, dan memperjuangkan pemikiran kritis yang memperhatikan interaksi antara tindakan individu dan struktur sosial.⁷⁷

Pendekatan post-anarkisme dalam studi hubungan internasional juga menekankan pada pentingnya partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif dalam konteks global yang semakin kompleks. Gerakan sosial dan individu-individu yang terlibat dalam dinamika internasional dapat berperan sebagai aktor penting dalam mengubah kondisi sosial dan politik, dan menantang hegemoni dari negara-negara besar atau kekuatan-kekuatan

⁷⁶ Lewis Call Postmodern Anarchism

⁷⁷ Gabriel Kuhn, 'Anarchism , Postmodernity , and Poststructuralism', 2009, 18–25.

lain dalam sistem internasional. Meskipun post-anarkisme dapat dianggap sebagai metodologi tandingan dalam studi hubungan internasional, pandangan ini tidak memperjuangkan isolasionisme atau penolakan terhadap negara dan politik internasional secara keseluruhan. Sebaliknya, pandangan ini mengakui pentingnya partisipasi politik yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam konteks global yang semakin kompleks. Pandangan post-anarkisme juga memperjuangkan perubahan sosial dan politik secara bertahap dan berkelanjutan, sebagai alternatif dari pandangan revolusioner yang bersifat absolut dan radikal.⁷⁸

Post-anarkisme mengkritisi beberapa aspek dalam studi Hubungan Internasional, seperti dominasi negara dan kurangnya perhatian pada aktor-aktor non-negara dalam sistem internasional. Namun, kritik ini tidak bermaksud untuk menolak studi Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu. Sebagai gantinya, post-anarkisme menawarkan perspektif alternatif yang dapat memperluas kerangka kerja dan pemahaman dalam memahami dinamika internasional. Post-anarkisme menekankan pentingnya partisipasi politik yang lebih inklusif dan mengakui kompleksitas sistem internasional yang melibatkan banyak aktor dan struktur sosial yang saling terkait. Sebagai perspektif kritis, post-anarkisme memperjuangkan pemikiran kritis dan inklusif dalam memahami dinamika internasional, dan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam studi Hubungan Internasional. Namun, seperti halnya perspektif kritis lainnya, post-anarkisme juga perlu diperdebatkan dan dikaji secara kritis oleh para akademisi dan pemikir dalam studi hubungan internasional.⁷⁹

⁷⁸ Newman, 'Crowned Anarchy: 1 Postanarchism and International Relations Theory'.

⁷⁹ Anarchism.

Hubungan konfederalisme demokrasi dan post-anarkisme memiliki keterkaitan yang erat, karena keduanya mengusung nilai-nilai kritis dan inklusif dalam memperjuangkan partisipasi politik yang lebih luas dan desentralisasi kekuasaan. Konfederalisme demokrasi, seperti yang diimplementasikan di Rojava, Suriah, adalah suatu bentuk organisasi politik yang berlandaskan prinsip-prinsip partisipasi demokratis, desentralisasi, dan kesetaraan. Konfederalisme demokrasi berupaya untuk menempatkan kekuasaan pada tangan rakyat, dengan menjunjung tinggi partisipasi langsung dan keputusan kolektif. Prinsip-prinsip ini juga tercermin dalam struktur politik konfederasi, di mana kekuasaan dipisahkan ke dalam tingkat lokal, regional, dan nasional, dan dikelola oleh majelis rakyat terpilih dan dewan-dewan warga.⁸⁰

Post-anarkisme, sebagai orientasi politik, menawarkan kerangka pemikiran alternatif yang kritis dan inklusif dalam memahami sistem politik dan sosial, dan menekankan pentingnya partisipasi politik yang lebih luas, serta desentralisasi kekuasaan. Post-anarkisme juga menolak dominasi negara dan menekankan pentingnya aktor-aktor non-negara dalam menciptakan perubahan sosial. Kaitan antara konfederalisme demokrasi dan post-anarkisme dapat dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang mereka anut. Keduanya menempatkan kekuasaan pada tangan rakyat, mendorong partisipasi langsung dan keputusan kolektif, dan menekankan desentralisasi kekuasaan. Keduanya juga menolak dominasi negara dan menempatkan kepentingan kolektif pada prioritas utama. Sejumlah penelitian telah mengaitkan konfederalisme demokrasi dengan konsep post-anarkisme, seperti yang diungkapkan oleh sejumlah pemikir seperti

⁸⁰ Mihail Dafydd Evans, 'Infinitely Demanding', *Symposium*, 12.2 (2008), 202–5 <<https://doi.org/10.5840/symposium200812237>>.

Murray Bookchin dan David Graeber. Mereka menilai bahwa konfederalisme demokrasi Rojava, meskipun bukan secara langsung, mengimplementasikan beberapa prinsip post-anarkisme, seperti partisipasi langsung, keputusan kolektif, dan desentralisasi kekuasaan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kaitan antara konfederalisme demokrasi dan post-anarkisme bukanlah satu-satunya sudut pandang yang mungkin. Sejumlah pemikir dan akademisi mungkin memiliki perspektif yang berbeda dalam mengaitkan keduanya, tergantung pada sudut pandang mereka dalam memahami kedua konsep tersebut.⁸¹

post-anarkisme dan konfederalisme demokrasi dapat diintegrasikan dalam kerangka pemikiran yang memperjuangkan partisipasi politik yang lebih luas, desentralisasi kekuasaan, dan penekanan pada kesetaraan sosial. Dalam konteks integrasi ini, post-anarkisme memberikan sudut pandang yang kritis dan inklusif dalam memahami sistem politik dan sosial, sementara konfederalisme demokrasi memberikan kerangka organisasi politik konkret yang mencoba menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam masyarakat.

Konfederalisme demokrasi sebagai bentuk organisasi politik mencoba untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokratis dengan membangun struktur politik yang berlandaskan partisipasi langsung, keputusan kolektif, dan desentralisasi kekuasaan. Konfederalisme demokrasi menempatkan kekuasaan pada tangan rakyat dan mencoba menghindari dominasi negara dengan mengorganisasi kekuasaan pada tingkat lokal, regional, dan nasional. Melalui struktur politik konfederasi, masyarakat dapat mengambil keputusan bersama dan membangun

⁸¹ 'The_Impossible_Community_Realizing_Community.Pdf'.

kekuatan bersama untuk menghadapi tantangan sosial dan politik.⁸² Di sisi lain, post-anarkisme sebagai orientasi politik menekankan pentingnya partisipasi politik yang lebih luas, penekanan pada keadilan sosial, dan menolak dominasi negara. Post-anarkisme mencoba membangun kerangka pemikiran yang inklusif dan kritis dalam memahami sistem politik dan sosial, sehingga memberikan pandangan yang lebih luas tentang perubahan sosial.⁸³

Dalam integrasi antara post-anarkisme dan konfederalisme demokrasi, konsep-konsep seperti partisipasi langsung, keputusan kolektif, dan desentralisasi kekuasaan diaktualisasikan dalam bentuk organisasi politik konkret yang mewakili aspirasi masyarakat yang lebih luas. Melalui keterpaduan konfederalisme demokrasi dan post-anarkisme, masyarakat dapat membangun alternatif bagi sistem politik yang otoriter dan menjunjung tinggi partisipasi politik yang lebih luas dan kesetaraan sosial. post-anarkisme sebagai orientasi politik dapat menjadi penting dalam memahami konfederalisme demokrasi di wilayah otonom Rojava, karena Rojava memiliki aspirasi politik yang sejalan dengan nilai-nilai post-anarkisme. Konfederalisme demokrasi di Rojava didasarkan pada prinsip partisipasi langsung, keputusan kolektif, dan desentralisasi kekuasaan, dan juga menekankan pentingnya inklusivitas, persamaan gender, dan keadilan sosial. Dalam konteks Rojava, post-anarkisme dapat membantu memperluas cakupan pandangan atas nilai-nilai ini, serta menekankan pentingnya perlawanan terhadap bentuk-bentuk dominasi negara dan kapitalisme. Dalam perspektif post-anarkisme, demokrasi seharusnya

⁸² Ocalan.

⁸³ Todd May. *The Political Philosophy of Poststructuralist Anarchism*

bukan hanya tentang pengambilan keputusan mayoritas, tetapi juga tentang kesetaraan politik dan sosial, serta penekanan pada keadilan sosial dan ekonomi.⁸⁴

Pemikir post-anarkisme seperti Hakim Bey dan Murray Bookchin juga memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ideologi konfederalisme demokrasi. Murray Bookchin, misalnya, mengembangkan teori "ekologi sosial" yang menekankan pentingnya hubungan manusia dengan lingkungannya dan mengecam sistem-sistem hierarkis yang merusak hubungan ini.⁸⁵ Kontribusi ini sangat relevan dengan praktek konfederalisme demokrasi di Rojava, yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu prioritasnya. Dengan demikian, post-anarkisme sebagai orientasi politik dapat menjadi alat penting dalam memperkuat dan memperluas konsep konfederalisme demokrasi di Rojava, serta mendorong praktek demokrasi langsung yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adil.⁸⁶

Namun meskipun terdapat kritik terhadap post-anarkisme dan konfederalisme demokrasi, kedua ideologi ini tetap menjadi sumber inspirasi bagi gerakan sosial dan politik di berbagai belahan dunia yang menuntut perubahan sosial dan politik yang lebih adil dan demokratis. Dalam studi hubungan internasional, Post-Anarkisme dan Konfederalisme Demokrasi menawarkan alternatif untuk paradigma mainstream seperti Realisme dan Liberalisme. Mereka menekankan pada pentingnya membangun solidaritas global antara gerakan sosial dan politik yang bertujuan menggulingkan hegemoni negara dan kapitalisme global. Post-

⁸⁴ Roussele and Evren.

⁸⁵ 'Politik Ekologi Sosial: Murray Bookchin: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive'.

⁸⁶ Knapp, Flach, and Ayboğa, *Democratic Confederalism*.

Anarkisme dan Konfederalisme Demokrasi menawarkan sebuah wawasan baru tentang bagaimana hubungan internasional dapat dikelola secara lebih demokratis dan adil. Mereka menunjukkan bahwa solidaritas dan kerja sama antara masyarakat global adalah kunci untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih adil.

4.4 Upaya Kurdi-Rojava Dalam Mempertahankan Gerakan Kolektif Masyarakat Tanpa Negara

Gerakan kolektif masyarakat tanpa negara di wilayah Kurdi-Rojava adalah sebuah gerakan sosial-politik yang telah menjadi perhatian dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir. Gerakan ini berjuang untuk mempertahankan sistem politik yang demokratis, egaliter, dan berdasarkan prinsip-prinsip sosialis, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan masyarakat secara kolektif. Upaya Kurdi-Rojava dalam mempertahankan gerakan kolektif masyarakat tanpa negara ini terutama dilakukan melalui sistem politik dan sosial yang mereka bangun di wilayah tersebut. Sistem politik Rojava didasarkan pada konsep "demokrasi rakyat" yang menghargai partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan dan menempatkan kesetaraan gender sebagai prinsip penting.⁸⁷

Di bawah sistem politik ini, Rojava telah membentuk Dewan-dewan Rakyat sebagai badan legislatif yang mewakili masyarakat dan kawasan mereka, serta Dewan-dewan Eksekutif sebagai badan pemerintahan yang menangani berbagai masalah administratif. Masyarakat di Rojava juga diberdayakan untuk membentuk komite-komite sosial dan ekonomi untuk mengelola sumber daya dan pelayanan dasar seperti air, listrik, kesehatan,

⁸⁷ A Nordhag, 'War, Peace and Ideologies: Approaching Peace in War through Democratic Confederalism and the War in Rojava', 2019 <<https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1344843%0Ahttps://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1344843/FULLTEXT01.pdf>>.

dan pendidikan. Selain itu, Rojava juga membangun pertahanan diri mereka melalui milisi rakyat yang disebut Yekîneyên Parastina Gel (YPG) dan Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ). Milisi-milisi ini telah berperang melawan ISIS dan berbagai kelompok ekstremis lainnya, dan telah memenangkan banyak pertempuran penting di wilayah tersebut.⁸⁸

Beberapa upaya konkret yang dilakukan oleh Kurdi-Rojava dalam mempertahankan gerakan kolektif masyarakat tanpa negara adalah:⁸⁹

1. Pembentukan struktur pemerintahan yang inklusif: Kurdi-Rojava telah membangun struktur pemerintahan yang inklusif dan demokratis melalui pembentukan "Majelis Rakyat" dan "Komune" yang memungkinkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Struktur ini juga mengakui hak-hak minoritas etnis dan agama dan mempromosikan partisipasi perempuan dalam politik.
2. Pendirian milisi yang melindungi wilayah dari serangan luar: Kurdi-Rojava juga telah mendirikan milisi yang bertujuan untuk melindungi wilayah dari serangan eksternal, termasuk serangan dari ISIS dan kelompok ekstremis lainnya.
3. Fokus pada ekonomi berbasis komunitas: Gerakan kolektif masyarakat tanpa negara Kurdi-Rojava juga mempromosikan ekonomi berbasis komunitas dan otonomi ekonomi lokal dengan mendorong pembentukan koperasi dan pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan.

⁸⁸ Ibid, Hal. 12

⁸⁹ RIC, 'Beyond the Frontlines: The Building of the Democratic System in North and East Syria', 2019, 62 <<https://rojavainformationcenter.com/background/political-system-documents>>.

4. Mengembangkan pendidikan dan budaya lokal: Kurdi-Rojava juga memperkuat pendidikan dan budaya lokal melalui pengembangan bahasa lokal dan pembukaan sekolah-sekolah baru. Ini membantu masyarakat lokal mempertahankan identitas budaya mereka dan mempromosikan kesetaraan gender.

Upaya Kurdi-Rojava dalam mempertahankan gerakan kolektif masyarakat tanpa negara telah berhasil menginspirasi gerakan-gerakan otonom lain di seluruh dunia dan memberikan contoh tentang bagaimana membangun masyarakat yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan. Namun, Kurdi-Rojava juga menghadapi banyak tantangan, termasuk serangan eksternal, embargo ekonomi, dan ketidakstabilan politik yang mengancam keberlangsungan gerakan ini.

Namun, upaya Kurdi-Rojava dalam mempertahankan gerakan kolektif masyarakat tanpa negara ini dihadapkan dengan banyak tantangan. Salah satunya adalah tekanan dan ancaman dari negara-negara tetangga seperti Turki dan Suriah yang menganggap gerakan ini sebagai ancaman bagi integritas wilayah mereka. Turki bahkan pernah melakukan invasi ke wilayah Rojava dan menargetkan kelompok-kelompok yang terkait dengan gerakan kolektif masyarakat tanpa negara. Meskipun demikian, gerakan kolektif masyarakat tanpa negara di Kurdi-Rojava tetap berjuang untuk mempertahankan sistem politik dan sosial mereka, serta mengembangkan kerjasama internasional dengan berbagai gerakan sosial dan politik di seluruh dunia. Upaya mereka mempertahankan gerakan ini merupakan contoh inspiratif bagi gerakan sosial-politik lainnya di seluruh dunia.

4.5 Dimensi *Ideas* Konfederalisme Demokrasi Sebagai Metodologi Tandingan Dalam Studi Hubungan Internasional Kontemporer

ide Konfederalisme Demokrasi adalah sebuah konsep politik yang mengusulkan adanya keterlibatan langsung dan partisipatif dari masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui suatu sistem konfederasi, di mana otonomi dan kebebasan daerah atau wilayah menjadi penting. Dalam konteks Hubungan Internasional kontemporer, ide Konfederalisme Demokrasi dapat dilihat sebagai metodologi tandingan yang menawarkan alternatif bagi sistem negara-negara bangsa yang dominan saat ini. Dalam perspektif Konfederalisme Demokrasi, hubungan internasional tidak hanya diatur oleh negara-negara, tetapi juga oleh masyarakat sipil internasional. Konfederalisme Demokrasi menekankan pentingnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah internasional. Oleh karena itu, sistem ini mempromosikan demokrasi yang partisipatif dan memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam menentukan kebijakan internasional.⁹⁰

Konsep Konfederalisme Demokrasi juga menawarkan solusi alternatif bagi konflik dan ketegangan antara negara-negara, dengan mengusulkan adanya jaringan konfederasi yang membentuk hubungan horizontal dan kerjasama di antara negara-negara dan masyarakat sipil. Dalam konteks ini, negara-negara yang berpartisipasi dalam jaringan konfederasi akan mempertahankan otonomi dan kebebasan mereka, sementara pada saat yang sama, mereka juga dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama dan mengambil keputusan bersama atas dasar konsensus. Dalam hal ini, Konfederalisme Demokrasi menawarkan

⁹⁰ 'Chair of Political Sociology Bachelor ' s in Politics , Philosophy and Economics DEMOCRATIC CONFEDERALISM AND PARTICIPATORY DEMOCRACY IN SUPERVISOR', 2021, 1–57.

konsep yang berbeda dari hegemoni yang didorong oleh negara-negara besar, yang seringkali menimbulkan konflik dan kebijakan yang tidak adil bagi negara-negara kecil. Konsep ini juga menekankan pentingnya multikulturalisme dan pengakuan atas keberagaman budaya dan identitas di dalam dan di antara negara-negara.⁹¹

Adapun kerangka dimensi Ideas Konfederalisme Demokrasi sebagai metodologi tandingan dalam studi Hubungan Internasional kontemporer dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹²

1. Dimensi Politik

Konfederalisme Demokrasi memiliki dimensi politik yang kuat, di mana sistem politik yang diusung adalah sistem yang partisipatif, demokratis, dan otonom. Konsep ini menantang sistem politik yang otoriter, seperti negara-negara yang mengutamakan kekuasaan terpusat dan menindas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Ada beberapa yang penting dari dimensi politik ini :

- a. Kesetaraan gender: Konfederalisme demokrasi Rojava menempatkan kesetaraan gender sebagai nilai inti dalam sistem politiknya. Ini tercermin dalam pengakuan peran dan kontribusi perempuan dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Konfederalisme demokrasi Rojava memperjuangkan partisipasi politik perempuan dan kebijakan yang progresif terkait dengan hak perempuan. Dalam konteks hubungan internasional, konsep kesetaraan gender ini dapat menjadi model alternatif yang dapat diadopsi oleh negara-negara lain.

⁹¹ Ibid, Hal. 15

⁹² Ibid, Hal. 20

- b. Multikulturalisme: Konfederalisme demokrasi Rojava menghargai keragaman budaya, bahasa, dan agama, dan mempromosikan multikulturalisme sebagai nilai inti. Konfederalisme demokrasi Rojava menempatkan pentingnya partisipasi masyarakat minoritas dalam pengambilan keputusan politik dan pengelolaan sumber daya. Dalam konteks hubungan internasional, konsep multikulturalisme ini dapat mempromosikan dialog antarbudaya dan mengurangi konflik antarnegara yang berkaitan dengan perbedaan agama, budaya, dan bahasa.
- c. Demokrasi langsung: Konfederalisme demokrasi Rojava mengadopsi prinsip demokrasi langsung sebagai metode pengambilan keputusan politik, di mana masyarakat langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ini memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks hubungan internasional, konsep demokrasi langsung ini dapat menstimulasi partisipasi politik yang lebih luas dan memperkuat sistem demokrasi yang lebih kuat dan adil.

Namun, konfederalisme demokrasi Rojava juga menghadapi berbagai tantangan dalam konteks hubungan internasional. Terutama, Rojava berada dalam kondisi konflik dan tekanan dari negara-negara tetangganya yang lebih kuat secara militer dan ekonomi. Selain itu, implementasi kesetaraan gender, multikulturalisme, dan demokrasi langsung dalam konfederalisme demokrasi Rojava masih dalam tahap pengembangan, dan memerlukan dukungan dan pengakuan dari masyarakat internasional untuk dapat berhasil dan berkembang. Dalam kesimpulannya, konfederalisme demokrasi Rojava memiliki dimensi ideas politik yang menarik sebagai metode tandingan dalam studi hubungan

internasional, terutama dalam mempromosikan kesetaraan gender, multikulturalisme, dan demokrasi langsung. Namun, implementasinya memerlukan dukungan dan pengakuan yang kuat dari masyarakat internasional, serta mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait dengan konflik dan kondisi polit

2. Dimensi Ekonomi

Konfederalisme Demokrasi juga memiliki dimensi ekonomi yang kuat, yaitu sistem ekonomi yang berbasis pada prinsip kesetaraan dan keadilan sosial, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup. Konsep ini menantang logika kapitalisme yang mengutamakan keuntungan individu dan korporasi, tanpa memperhatikan dampaknya pada keadilan sosial dan lingkungan hidup. Ada beberapa yang penting dari dimensi ekonomi ini :

- a. Desentralisasi: Konfederalisme demokrasi Rojava menempatkan prinsip desentralisasi sebagai nilai inti dalam sistem politik dan ekonominya. Ini memungkinkan masyarakat lokal untuk mengambil keputusan secara partisipatif, serta mempertahankan otonomi mereka dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokal. Dalam konteks hubungan internasional, desentralisasi dapat membawa manfaat dalam mengurangi ketergantungan terhadap keputusan pusat dan mengembangkan kerjasama horizontal antarnegara.
- b. Koperasi: Konfederalisme demokrasi Rojava mendorong pembentukan koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi yang partisipatif dan demokratis. Koperasi memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya mereka secara bersama-sama dan mengambil keputusan bersama dalam

pengelolaannya. Koperasi juga dapat menjadi alat untuk membangun perdagangan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan, karena memperkuat kekuatan ekonomi masyarakat lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap perusahaan multinasional.

- c. Ekonomi hijau: Konfederalisme demokrasi Rojava mengadopsi prinsip ekonomi hijau, yang mempertimbangkan dampak lingkungan dari setiap keputusan ekonomi dan berupaya mengurangi emisi karbon. Ini dapat menjadi kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan ekologi global dan mendorong kerjasama internasional dalam mencapai tujuan ini.

Namun, konfederalisme demokrasi Rojava juga menghadapi berbagai tantangan dalam konteks hubungan internasional. Terutama, Rojava berada dalam kondisi konflik dan tekanan dari negara-negara tetangganya yang lebih kuat secara militer dan ekonomi. Selain itu, ekonomi hijau dan koperasi dalam konfederalisme demokrasi Rojava masih dalam tahap pengembangan, dan memerlukan dukungan dan pengakuan dari masyarakat internasional untuk dapat berhasil dan berkembang. Dalam kesimpulannya, konfederalisme demokrasi Rojava memiliki dimensi ideas ekonomi yang menarik sebagai metode tandingan dalam studi hubungan internasional, terutama dalam mengembangkan kerjasama internasional yang lebih demokratis dan adil. Namun, implementasinya memerlukan dukungan dan pengakuan yang kuat dari masyarakat internasional, serta mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait dengan konflik dan kondisi politik yang kompleks di wilayah ini.

3. Dimensi Sosial

Konfederalisme Demokrasi memiliki dimensi sosial yang kuat, di mana kesetaraan sosial dan keadilan menjadi bagian integral dalam sistem politik dan ekonomi yang diusung. Konsep ini menantang norma sosial yang patriarkal dan diskriminatif, serta mengadvokasi inklusivitas dalam membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Ada beberapa yang penting dari dimensi Sosial ini :

- a. Solidaritas sosial: Konfederalisme demokrasi Rojava menempatkan solidaritas sosial sebagai nilai inti dalam sistem politiknya. Ini tercermin dalam pengakuan atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta upaya untuk membangun ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam konteks hubungan internasional, konsep solidaritas sosial ini dapat mempromosikan kolaborasi antarnegara dalam mengatasi masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidaksetaraan ekonomi.
- b. Komunalisme: Konfederalisme demokrasi Rojava menghargai prinsip-prinsip komunalisme, yaitu prinsip bahwa masyarakat harus memiliki kontrol atas sumber daya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konfederalisme demokrasi Rojava menempatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dalam konteks hubungan internasional, konsep komunalisme ini dapat menjadi model alternatif untuk mengatasi masalah seperti penyebaran kekayaan dan kekuasaan yang tidak seimbang di antara negara-negara.

- c. Pemberdayaan masyarakat: Konfederalisme demokrasi Rojava menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai prinsip yang sangat penting. Konfederalisme demokrasi Rojava berusaha untuk memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi, serta dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dalam konteks hubungan internasional, konsep pemberdayaan masyarakat ini dapat memperkuat peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membantu mengurangi kesenjangan kekuasaan antara negara-negara.

Namun, seperti halnya dengan dimensi ideas politik, konfederalisme demokrasi Rojava juga menghadapi berbagai tantangan dalam konteks hubungan internasional. Terutama, Rojava berada dalam kondisi konflik dan tekanan dari negara-negara tetangganya yang lebih kuat secara militer dan ekonomi. Selain itu, implementasi solidaritas sosial, komunalisme, dan pemberdayaan masyarakat dalam konfederalisme demokrasi Rojava masih dalam tahap pengembangan, dan memerlukan dukungan dan pengakuan dari masyarakat internasional untuk dapat berhasil dan berkembang.

Dalam kesimpulannya, konfederalisme demokrasi Rojava memiliki dimensi ideas sosial yang menarik sebagai metode tandingan dalam studi hubungan internasional, terutama dalam mempromosikan solidaritas sosial, komunalisme, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, implementasinya memerlukan dukungan dan pengakuan yang kuat dari masyarakat internasional, serta mempertimbangkan tantangan dan risiko yang terkait dengan konflik dan kondisi politik.

4. Dimensi Internasional

Konfederalisme Demokrasi juga memiliki dimensi internasional yang kuat, yaitu kerja sama internasional yang inklusif dan berbasis pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Konsep ini menantang hegemoni negara-negara besar dan institusi internasional yang sering dianggap sebagai simbol otoriter dalam sistem internasional.

Dalam kerangka dimensi Ideas Konfederalisme Demokrasi sebagai metodologi tandingan dalam studi Hubungan Internasional kontemporer, empat dimensi tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Ini juga yang kemudian mempengaruhi beberapa dimensi ide pemikiran seperti:⁹³

1. Pemikiran Anti-Otoriter

Konfederalisme Demokrasi memiliki pemikiran yang anti-otoriter, yaitu menolak otoritas yang terpusat dan mengadvokasi sistem kekuasaan yang lebih partisipatif dan demokratis. Konsep ini menantang hegemoni negara-negara besar dan institusi internasional seperti PBB dan IMF yang sering dianggap sebagai simbol otoriter dalam sistem internasional.

2. Pemikiran Feminis

Konfederalisme Demokrasi juga memiliki dimensi pemikiran feminis, di mana kesetaraan gender dan keadilan sosial menjadi bagian integral dari sistem politik dan sosial yang diusung. Hal ini menantang norma patriarkal dalam sistem internasional yang sering mengabaikan peran penting wanita dalam membangun perdamaian dan keadilan sosial.

⁹³ A Nordhag, 'War, Peace and Ideologies: Approaching Peace in War through Democratic Confederalism and the War in Rojava', 2019 <<https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1344843%0Ahttps://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1344843/FULLTEXT01.pdf>>.

3. Pemikiran Ekologis

Konfederalisme Demokrasi memiliki pemikiran ekologis, yaitu menempatkan lingkungan hidup sebagai prioritas dalam kebijakan publik. Hal ini menjadi sangat penting di era kontemporer yang diwarnai oleh perubahan iklim dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Konsep ini menantang logika ekonomi neoklasik yang mengabaikan dampak lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi.

Dalam kesimpulannya, dalam studi Hubungan Internasional kontemporer, Konfederalisme Demokrasi dapat menjadi metodologi tandingan yang mampu menantang norma dan paradigma yang sudah mapan dalam sistem internasional. Ide Konfederalisme Demokrasi sebagai metodologi tandingan dalam studi Hubungan Internasional kontemporer, menawarkan suatu alternatif bagi sistem negara-negara bangsa yang dominan saat ini, dengan menekankan pada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah internasional, serta kerjasama antar negara dan masyarakat sipil dalam mengatasi masalah bersama. Konsep ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional tidak hanya dapat dicapai melalui sistem yang didorong oleh kepentingan nasional, tetapi juga melalui partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sistem politik Rojava didasarkan pada konsep "demokrasi rakyat" dan terdiri dari Dewan-dewan Rakyat sebagai badan legislatif, Dewan-dewan Eksekutif sebagai badan pemerintahan, serta komite-komite sosial dan ekonomi yang diberdayakan untuk mengelola sumber daya dan pelayanan dasar. Selain itu, Rojava juga membangun pertahanan diri mereka melalui milisi rakyat yang telah memenangkan banyak pertempuran penting melawan ISIS dan berbagai kelompok ekstremis lainnya. Gerakan ini telah menjadi perhatian dunia internasional dalam beberapa tahun terakhir karena keberhasilan mereka dalam mempertahankan sistem politik yang demokratis dan berdasarkan prinsip-prinsip sosialis.

Meskipun konfederalisme demokrasi dan post-anarkisme menjadi suatu metodologi tandingan dalam kajian hubungan internasional, keduanya merupakan alternatif dari paradigma mainstream seperti Realisme dan Liberalisme yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Post-Anarkisme menekankan pada pentingnya membangun alternatif konkret dan pragmatis untuk melawan sistem kapitalisme dan hegemoni negara, sedangkan Konfederalisme Demokrasi menggabungkan prinsip-prinsip konfederasi dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang mengutamakan partisipasi langsung dan demokratis dalam pengambilan keputusan serta menolak dominasi negara.

Dalam konteks globalisasi dan hegemoni kapitalisme global, Post-Anarkisme dan Konfederalisme Demokrasi menawarkan alternatif yang

lebih konkret dan pragmatis untuk melawan sistem yang menindas dan menghisap sumber daya alam dan manusia. Mereka menekankan pada pentingnya membangun solidaritas global antara gerakan sosial dan politik yang bertujuan menggulingkan hegemoni negara dan kapitalisme global.

Dalam hal ini, Post-Anarkisme dan Konfederalisme Demokrasi menawarkan sebuah wawasan baru tentang bagaimana hubungan internasional dapat dikelola secara lebih demokratis dan adil, dengan menekankan pada partisipasi langsung dari masyarakat dalam pengambilan keputusan serta membangun solidaritas global antara gerakan sosial dan politik. Oleh karena itu, Post-Anarkisme dan Konfederalisme Demokrasi dapat menjadi alternatif yang menarik dan relevan dalam studi Hubungan Internasional, terutama dalam menanggapi tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia.

5.2 Saran

Dari apa yang telah di jabarkan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penelitian dan diskusi yang lebih lanjut mengenai aplikasi Post-Anarkisme dan Konfederalisme Demokrasi di Rojava dalam kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Meskipun konsep-konsep ini menawarkan alternatif yang menarik, namun masih perlu dikembangkan lebih lanjut tentang bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks internasional.
2. Perlu adanya dukungan yang lebih besar terhadap pengembangan demokrasi berbasis konfederasi di Rojava dan gerakan-gerakan

sosial dan politik lainnya di seluruh dunia yang mengadopsi prinsip-prinsip ini. Dukungan ini dapat berupa dukungan media, maupun dukungan moral

3. Dalam pengembangan studi Hubungan Internasional, perlu ada keterlibatan lebih banyak pihak yang berbeda, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi, untuk menciptakan wacana yang lebih inklusif dan beragam. Dalam hal ini, pengalaman Rojava dapat menjadi inspirasi bagi studi Hubungan Internasional yang lebih inklusif dan beragam.
4. Perlu adanya refleksi kritis terhadap konsep-konsep yang telah ada dalam studi Hubungan Internasional, seperti Realisme dan Liberalisme, dan bagaimana pengalaman Rojava dapat memberikan alternatif yang lebih inklusif dan beragam. Refleksi ini dapat membuka ruang untuk munculnya alternatif-alternatif baru dalam studi Hubungan Internasional.
5. Terakhir, perlu adanya dialog yang lebih terbuka dan inklusif antara berbagai negara dan budaya dalam menciptakan solusi yang lebih demokratis dan adil untuk masalah-masalah global. Hal ini melibatkan pendekatan multikultural dan multilateral dalam hubungan internasional, serta pengakuan atas kepentingan-kepentingan yang berbeda dan saling terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anarchism, Postmodern, *Postmodern Anarchism*

'Arab Spring | History, Revolution, Causes, Effects, & Facts | Britannica'

<<https://www.britannica.com/event/Arab-Spring>> [accessed 4 January 2023]

Aretaios, Evangelos, *The Rojava Revolution*, *OpenDemocracy*, 2015

<<https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/evangelos-aretaios/rojava-revolution>>

Brier, Jennifer, and lia dwi jayanti, *Post-Anarchism A Reader*, 2020, xxi

<<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>>

Burchill, Scott, and Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional*, 2015, v

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, and Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, 2013, I

'Chair of Political Sociology Bachelor ' s in Politics , Philosophy and

Economics DEMOCRATIC CONFEDERALISM AND

PARTICIPATORY DEMOCRACY IN SUPERVISOR', 2021, 1–57

Dafydd Evans, Mihail, 'Ininitely Demanding', *Symposium*, 12.2 (2008),

202–5 <<https://doi.org/10.5840/symposium200812237>>

Dakheelallah Alharbi, Zarina Othman, and Sity Daud, 'The Arab Spring and Syria Security', *Global Journal of Political Science and*

Administration, 7.5 (2019), 43–49

Dillon, Michael, *Dekonstruksi Politik Internasional*, ed. by Jenny Edkins and Nick Vaughan-Williams, I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

'Explainer: The Syrian Democratic Council – A Proposal for a Democratic Syria – Rojava Information Center'

<<https://rojavainformationcenter.com/2020/06/explainer-the-syrian-democratic-council-a-proposal-for-a-democratic-syria/>> [accessed 9 October 2022]

Gen, Funda, and L U Onba, 'Morality in Machiavelli , Hobbes and Locke ',

2013, 25–40 <<http://www.flsfdergisi.com/sayi15/25-40.pdf>>

Inceoğlu, M Çağrı, 'Arendt's Critique of The Nation-State in The Origins of Totalitarianism', *Journal of Yasar University*, 3.10 (2008), 1331–44

'Italy - Institutional Reforms | Britannica'

<<https://www.britannica.com/place/Italy/Institutional-reforms#ref318336>> [accessed 7 February 2023]

J. Kiersey, Nicholas, and Doug Stokes, *Michel Foucault Dan Hubungan Internasional*, 2014, I

Journal, Imemo, '© 2019 Г. А. Куприянов', 3, 2019, 37–50

<<https://doi.org/0.20542/afij-2019-3-37-50.DOI>>

Kazmi, Zaheer, 'Anarchism and International Theory', *Polite Anarchy in International Relations Theory*, 2012, 51–76

<https://doi.org/10.1057/9781137028136_3>

- VAN KLINK, BART, 'The Utopia of Rojava: A New World for Stateless People', *Onati Socio-Legal Series*, 12.4 (2022), 822–42
<<https://doi.org/10.35295/OSLS.IISL/0000-0000-0000-1269>>
- Knapp, Michael, Anja Flach, and Ercan Ayboğa, *Democratic Confederalism, Revolution in Rojava*, 2017
<<https://doi.org/10.2307/j.ctt1gk07zg.10>>
- , 'Revolution in Rojava', *Revolution in Rojava*, 2017
<<https://doi.org/10.2307/J.CTT1GK07ZG>>
- Kuhn, Gabriel, 'Anarchism , Postmodernity , and Poststructuralism', 2009, 18–25
- 'Masa Depan Rojava Di Suriah' <<https://tirto.id/masa-depan-rojava-di-suriah-czH5>> [accessed 2 February 2023]
- May, Todd, 'Poststructuralist Anarchism', May, 1994
- McKenna, Brian, 'New Worlds', *Infosecurity Today*, 1.4 (2004), 1
<[https://doi.org/10.1016/S1742-6847\(04\)00073-4](https://doi.org/10.1016/S1742-6847(04)00073-4)>
- 'More Kurdish Cities Liberated As Syrian Army Withdraws from Area'
<<https://www.gulanmedia.com/en/story/109886/1621544504-2094-more-kurdish-cities-liberated-as-syrian-army-withdraws-from-area.>>
[accessed 9 October 2022]
- Newman, Saul, 'Crowned Anarchy: 1 Postanarchism and International Relations Theory', *Millennium: Journal of International Studies*, 40.2 (2012), 259–78 <<https://doi.org/10.1177/0305829811417229>>

———, 'Editorial : Postanarchism'

Nordhag, A, 'War, Peace and Ideologies: Approaching Peace in War through Democratic Confederalism and the War in Rojava', 2019
<<https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1344843%0Ahttps://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1344843/FULLTEXT01.pdf>>

Nustad, Knut G., and Heather Swanson, 'Political Ecology and the Foucault Effect: A Need to Diversify Disciplinary Approaches to Ecological Management?', *Environment and Planning E: Nature and Space*, 5.2 (2022), 924–46
<<https://doi.org/10.1177/25148486211015044>>

Ocalan, Abdullah, *Abdullah Ocalan*

Ocallan, Abdullah, *Revolusi Perempuan Kehidupan Membebaskan*, 2022

Of, Discourses, Nineteenth Century, and Paradigms O F Western, 'Kyle Owen Willard', XII.2016

Plutarch, and Ian Scott-Kilvert, *The Rise and Fall of Athens*, 1960

'Politik Ekologi Sosial : Murray Bookchin : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive' <<https://archive.org/details/politik-ekologi-sosial/page/54/mode/2up?view=theater>> [accessed 7 January 2023]

'Revolution in Rojava | The Anarchist Library'

<<https://theanarchistlibrary.org/library/michael-knapp-anja-flach-and->

ercan-ayboga-revolution-in-rojava> [accessed 28 January 2023]

'Revolutionary Anarchism and the Anti-Globalization Movement | The Anarchist Library' <<https://theanarchistlibrary.org/library/lucien-van-der-walt-revolutionary-anarchism-and-the-anti-globalization-movement>> [accessed 6 April 2023]

RIC, 'Beyond the Frontlines: The Building of the Democratic System in North and East Syria', 2019, 62
<<https://rojavainformationcenter.com/background/political-system-documents>>

Rousselle, Duane., and Süreyya. Evren, 'Post-Anarchism : A Reader', 2011, 268

Ryan, Cooper, and Tauer, 'Simulating Sovereignty: Intervention, the State and Symbolic Exchange', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2013, 12–26

Sampath, Rajesh, 'The Idea of the Nation-State as an Obstacle to the Right to Global Development', *IAFOR Journal of Arts & Humanities*, 3.1 (2015) <<https://doi.org/10.22492/ijah.3.1.02>>

Sunca, Yasin, 'The Revolution in Rojava and the International', *Envisioning the World: Mapping and Making the Global*, July 2012, 2021, 105–23 <<https://doi.org/10.14361/9783839455296-009>>

'Syrian Kurdish Militia Takes Over Oil Fields - Al-Monitor: Independent, Trusted Coverage of the Middle East' <<https://www.al->

monitor.com/originals/2013/03/power-vacuum-oil-fields-syria-kurdish-militia-pyd.html> [accessed 9 October 2022]

'The_Impossible_Community_Realizing_Community.Pdf'

'The Battle for Raqqa and the Challenges after Liberation – Combating Terrorism Center at West Point' <<https://ctc.westpoint.edu/the-battle-for-raqqa-and-the-challenges-after-liberation/>> [accessed 9 October 2022]

'The Main Principles of Democratic Confederalism – ADM' <<https://democraticmodernity.com/the-main-principles-of-democratic-confederalism/>> [accessed 10 October 2022]

'The Main Principles of Democratic Confederalism | The Anarchist Library' <<https://theanarchistlibrary.org/library/komun-academy-the-main-principles-of-democratic-confederalism>> [accessed 7 January 2023]

'The Meaning of Confederalism | Institute for Social Ecology' <<https://social-ecology.org/wp/1990/11/the-meaning-of-confederalism/>> [accessed 10 October 2022]

'The Political Theory of Anarchism | The Anarchist Library' <<https://theanarchistlibrary.org/library/april-carter-the-political-theory-of-anarchism>> [accessed 6 April 2023]

'The Rise of Rojava on JSTOR' <<https://www.jstor.org/stable/27000999>> [accessed 2 February 2023]

'The Rojava Revolution – A Decade On (Part I) – Rojava Information

Center' <https://rojavainformationcenter.com/2022/07/10-years-of-the-rojava-revolution-much-achieved-still-much-to-come/#footnote_23_12522> [accessed 9 October 2022]

Toynbee, Arnold, *Sejarah Umat Manusia*, ed. by Kamdani (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

Yeğen, Mesut, Uğraş Ulaş Tol, and Mehmet Ali Çalışkan, 'Ethnicity and Elections in Eastern Turkey: What Do the Kurds Want?', *Contemporary Review of the Middle East*, 7.4 (2020), 446–63 <<https://doi.org/10.1177/2347798920939841>>

